

**STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA
ACEH DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN
KEBANGSAAN**

SKRIPSI

Disusun Oleh

SYIFA QURATUNNADA

NIM. 210801010

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

BANDA ACEH

TAHUN 2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Syifa Quratunnada
NIM : 210801010
Tempat / Tanggal Lahir : Meulaboh, 18 April 2003
Program Studi : Ilmu Politik
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Judul Skripsi : Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Banda
Aceh Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila Dan
Wawasan Kebangsaan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini, saya buat dengan sebenar-benarnya.

Banda Aceh, 27 Juli 2026

Yang menyatakan,




Syifa Quratunnada
NIM. 210801010

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu sosial dan ilmu pemerintahan

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1)

dalam ilmu Politik

Oleh :

SYIFA QURATUNNADA

NIM. 210801010

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Program Studi Ilmu Politik

Disetujui untuk munaqasyah kan oleh:

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II



Dr. Abdullah Sani. Lc. M.A
NIP. 19640705 199603 1 003



Renaldi Safriansyah. S.E. M.Hsc. M.P.M
NIP. 197901072023211003

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Skripsi

SYIFA QURATUNNADA
NIM 210801010

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan
Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh Dan Dinyatakan Lulus Serta
Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Program Studi Ilmu Politik

Pada Hari /Tanggal: Selasa, 18 Agustus 2026

Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua

Dr. Abdullah Sani, Lc., M.A
NIP.19640705199603003

Sekretaris

Renaldi Satriansyah, S.E. M.Hsc. M.P.M
NIP. 197901072023211003

Penguji I

Eka Januar, M.Soc. S.c
NIP. 198401012015031003

Penguji II

Danil Akbar Tagwadin, B.I.A.M., M.SC., Ph.D.
NIP. 198904082023211022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di tengah perkembangan teknologi informasi, globalisasi, serta karakteristik Aceh sebagai daerah otonomi khusus yang memiliki dinamika sosial dan historis tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh serta mengidentifikasi tantangan dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Sugiyono melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi sosialisasi, seminar, dialog interaktif, pendidikan politik, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, serta pemanfaatan media digital dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pelaksanaan strategi tersebut masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi generasi muda, serta pengaruh arus informasi digital. Meskipun demikian, strategi yang diterapkan dinilai mampu mendukung penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat Kota Banda Aceh.

Kata Kunci: Strategi, Kesbangpol, Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, Banda Aceh.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT serta selawat dan salam bagi Rasulullah SAW, karena atas rahmat dan pertolongan-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “STRATEGI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH DALAM PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN” guna memenuhi syarat gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Peneliti menyadari bahwa dalam proses penulisannya, skripsi ini telah banyak memperoleh masukan, arahan, gagasan, doa, serta dorongan semangat dari berbagai kalangan. Oleh karena itu, dengan segala hormat dan ketulusan hati, peneliti menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian karya ini.

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Prof. Dr. Muji Mulia, M. Ag., Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ramzi Murziqin, S.H., M.A. Ketua Program Studi Ilmu Politik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Dr. Abdullah Sani. Lc., M.A. Selaku dosen pembimbing pertama dalam penulisan skripsi saya.

5. Renaldi Safriansyah. S.E. M.Hsc. M.P.M. Selaku dosen pembimbing kedua dalam penulisan skripsi saya.
6. Terimakasih Kepada Informan Wawancara Saya yang telah meluangkan waktu dan tenaga untuk dapat saya temui dan diberikan jawaban, semoga informan yang terhormat di permudah segala urusan.
7. Cinta pertama saya, Ayahanda tercinta, Baihaqi. Terima kasih telah menjadikan saya wanita yang penuh kebahagiaan. Terima kasih selalu berjuang dalam mengupayakan kehidupan yang terbaik untuk anak perempuan ini, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik saya, memberikan motivasi, dukungan moral dan material serta doa sehingga meringankan langkah saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Ibu Lis Suryaani tercinta surgaku, cinta pertama dari penulis ini, ibu merupakan sosok yang paling hebat. Kiranya sebanyak apa pun kalimat yang tertulis tidak akan bisa mengutarakan semua amal kebaikan ibu. Anakmu hanya bisa mengatakan maaf dan terima kasih. Maaf atas setiap tindakan yang mengecewakan. Maaf atas setiap hal yang belum mampu ku usahakan. Maaf karna masih belum mampu menjadi seperti yang ibu inginkan. Terima kasih atas kasih dan sayang yang tak pernah usai, terima kasih telah menjadi teman hidup, tempat bercerita dan rumah paling nyaman ketika dunia ku tidak baik-baik saja, terima kasih sudah mau berkorban dan berjuang untuk anak kecilmu ini, yang selalu mengalah dan memaafkan anak bungsumu ini. Mungkin, anakmu tergolong satu di antara milyaran manusia yang beruntung dilahirkan

dari rahim wanita sehebat ibu. Sekali lagi terima kasih tak terhingga untuk ibu kuat dan hebat.

9. Terakhir, saya berterima kasih kepada satu sosok gadis yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang perempuan sederhana dengan hati kecil tetapi dengan impian besar. Terima kasih kepada peneliti skripsi ini yaitu diriku sendiri Syifa Quratunnada. Terima kasih telah hadir di dunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan semesta hari demi hari. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tidak dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apa pun yang kamu dapatkan. Jangan lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah di mana pun kamu berada. Rayakan apa pun dalam dirimu dan jadikan di mana pun dirimu sebagai sosok yang bermanfaat untuk dirimu sendiri maupun orang lain. Aku berdoa semoga langkah kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi orang-orang baik dan hebat, serta mimpimu satu per satu akan terjawab. Aamiin

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.4.1. Manfaat Teoretis	6
1.4.2. Manfaat Praktis	7
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. Penelitian Terdahulu	9
2.2. Landasan Teori.....	13
2.2.1. Konsep Ideologi, Ideologi Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan.....	13
2.2.2. Teori Nation Building	16
2.2.3. Teori Manajemen Strategi Sektor Publik.....	24
2.3. Kerangka Berfikir	29
BAB III	30
METODOLOGI PENELITIAN.....	30
3.1 Lokasi Penelitian.....	30
3.2. Jenis Penelitian.....	30
3.3. Metode Pengumpulan Data	32
3.4 Teknik Pemilihan Informan	33
3.4.1. Purposive Sampling	33

3.4.2. Informan Penelitian.....	34
3.5. Sumber Data.....	34
3.5.1. Data Primer	34
3.5.2. Data Sekunder	35
3.6. Teknik Analisis Data.....	36
3.7 Teknik Keabsahan Data	38
BAB IV.....	39
PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
4.1.1 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.....	39
4.2. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.....	42
4.3. Kondisi Pemahaman Kebangsaan Masyarakat	45
4.3.1. Strategi ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan	50
4.3.2 Sasaran dan Segmentasi Kelompok Binaan.....	52
4.3.3. Pola Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor.....	54
4.3.4 Upaya Mitigasi, dan Evaluasi Program.....	56
4.4. Tantangan Implementasi Strategi Pembinaan Kebangsaan	59
BAB V	73
PENUTUP	73
5.1. Kesimpulan	73
5.2. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	77

DAFTAR GAMBAR

Figure 1Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banda Aceh 40



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Izin Turun Lapangan	81
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian Instansi.....	82
Lampiran 3 Dokumentasi Informan.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pancasila merupakan dasar filosofis sekaligus konsensus fundamental yang menopang eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik sebagai staatsfundamentalnorm maupun sebagai kerangka orientasi nilai bagi seluruh penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedudukannya tidak semata bersifat normatif-tekstual sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melainkan juga bersifat fungsional sebagai paradigma yang mengarahkan pembentukan kebijakan, perilaku politik, serta interaksi sosial-kemasyarakatan. Pancasila, dalam konteks ini, diposisikan sebagai ideologi terbuka, yakni suatu sistem nilai yang tidak bersifat kaku dan tertutup, melainkan senantiasa terbuka terhadap dinamika perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri serta nilai-nilai dasarnya. Karakteristik keterbukaan tersebut tercermin dari sifat nilai-nilainya yang tidak diproduksi secara sepihak oleh negara, tetapi digali dari kekayaan rohani, moral, dan kultural masyarakat Indonesia itu sendiri, sehingga ideologi ini senantiasa relevan untuk diinternalisasikan lintas generasi dan lintas konteks kewilayahan.¹

Sebagai ideologi terbuka, Pancasila memerlukan proses reaktualisasi dan reproduksi nilai secara berkesinambungan agar tidak mengalami stagnasi makna maupun reduksi fungsi di tengah arus globalisasi informasi yang masif. Ketahanan

¹ A. Aco Agus., "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi.," *Jurnal Tomalebbi*, hlm. 235-2 (2022).

ideologi suatu bangsa pada dasarnya tidak bersifat statis, melainkan mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh dinamika sosial-politik domestik maupun infiltrasi paham-paham transnasional yang berpotensi kontradiktif dengan nilai-nilai dasar kebangsaan.² Rendahnya tingkat pemahaman sebagian kelompok masyarakat terhadap esensi filosofis Pancasila turut menjadi faktor yang mengakselerasi penyebaran narasi-narasi ideologis alternatif, baik yang bersumber dari paham radikalisme keagamaan, separatisme kedaerahan, maupun individualisme yang berseberangan dengan prinsip kolektivisme kebangsaan. Kondisi demikian menegaskan urgensi adanya intervensi kelembagaan yang sistematis dalam upaya pembinaan ideologi Pancasila, sebagai langkah preventif sekaligus kuratif terhadap potensi disintegrasi nilai pada level masyarakat.

Pembinaan ideologi Pancasila secara konseptual dapat dimaknai sebagai proses pewarisan, penanaman, dan penguatan nilai-nilai dasar kebangsaan secara terstruktur melalui jalur pendidikan formal, sosialisasi kelembagaan, maupun pendekatan kultural-partisipatif yang melibatkan tokoh masyarakat dan elemen sipil.³ Penguatan nilai-nilai tersebut tidak dapat dipisahkan dari konsep wawasan kebangsaan, yakni kesadaran kolektif suatu bangsa untuk hidup bersama dalam ikatan kesatuan dengan tetap menghormati keberagaman identitas suku, agama, ras, dan golongan. Wawasan kebangsaan berfungsi sebagai instrumen pemersatu yang meredam potensi fragmentasi sosial akibat eksploitasi sentimen kedaerahan

² R. and Kurniawan. T Pradhan, "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.," *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1). (2023).

³ L. Idham, I., Sudewi, S., & Nadriana, "Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat.," *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(2), no. 96. (2022).

maupun primordialisme, sekaligus menjadi prasyarat bagi terciptanya soliditas nasional dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan baik yang bersumber dari faktor internal maupun eksternal.⁴ Pendidikan wawasan kebangsaan dengan demikian diorientasikan pada pembentukan rasa senasib sepenanggungan serta penempatan kepentingan nasional di atas kepentingan kelompok, golongan, maupun kedaerahan, tanpa menegasikan eksistensi identitas lokal yang melekat pada masyarakat.

Dalam struktur pemerintahan Indonesia, fungsi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan pada tingkat daerah diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) sebagai unsur penunjang pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi strategis dalam bidang ideologi, politik, dan ketahanan ekonomi social budaya. Lembaga ini berperan sebagai ujung tombak negara dalam mendekatkan nilai-nilai ideologis kepada masyarakat melalui pendekatan sosialisasi, pembinaan generasi muda, serta penguatan sinergi dengan lembaga keagamaan dan elemen masyarakat sipil.⁵ Efektivitas kerja kelembagaan Kesbangpol, dengan demikian, menjadi determinan penting bagi keberhasilan reproduksi nilai-nilai Pancasila pada level masyarakat akar rumput, mengingat lembaga ini memiliki jangkauan operasional yang langsung bersentuhan dengan dinamika sosial-politik lokal.

⁴ S. N. Mubarak, R., Munfiatik, S., Widyanti, E., & Hasanah, "Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Penguatan Nilai-Nilai Empat Konsensus Nasional,," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. no. 31 (2024).

⁵ M. D. Idrus, I. A., & Lukito, "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda Di Sungai Bambu: Studi Kasus Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jakarta Utara. Ahsana," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1), no. 1–7. (2024).

Kota Banda Aceh sebagai locus penelitian ini memiliki konfigurasi sosio-politik yang distingtif dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Aceh merupakan satu-satunya provinsi yang memperoleh status otonomi khusus dengan kewenangan penerapan syariat Islam secara formal, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang merupakan produk hukum hasil resolusi konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka dengan Pemerintah Republik Indonesia.⁶

Konteks historis tersebut menghasilkan relasi yang kompleks antara identitas keislaman, identitas keacehan, dan identitas kebangsaan Indonesia, yang pada gilirannya menuntut pendekatan pembinaan ideologi yang bersifat kontekstual dan tidak dapat disamakan secara generik dengan daerah-daerah yang tidak memiliki pengalaman konflik separatis maupun kekhususan regulasi keagamaan. Multikulturalitas dan kekayaan nilai lokal yang dimiliki Indonesia, termasuk Aceh, pada dasarnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, melainkan dapat saling memperkuat apabila dikelola melalui strategi pembinaan yang tepat.⁷

Berdasarkan observasi awal, pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Kesbangpol pada berbagai daerah umumnya masih menghadapi kendala berupa keterbatasan anggaran, minimnya

⁶ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Republik Indonesia*, 2006.

⁷ I. W. Handayani, I. G. A. M., & Muliawan, "Pancasila Values and National Identity: A Study on Multiculturalism in Indonesia. Society and Development," *Politik* 2(1), no. 59–73. (2022).

partisipasi generasi muda, serta belum optimalnya pendekatan metodologis dalam penyampaian materi ideologis kepada masyarakat.⁸

Studi-studi terdahulu mengenai pembinaan ideologi Pancasila umumnya berfokus pada institusi pendidikan formal atau pada level kebijakan nasional, sementara kajian yang secara spesifik menyoroti strategi kelembagaan Kesbangpol di daerah dengan kekhususan otonomi seperti Aceh masih relatif terbatas. Kesenjangan literatur tersebut memberikan justifikasi akademik bagi penelitian ini untuk mengeksplorasi secara mendalam strategi yang dirumuskan dan diimplementasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, baik dari aspek perumusan program, pendekatan implementasi, identifikasi hambatan struktural maupun kultural, hingga evaluasi efektivitas capaian program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di wilayah tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara komprehensif strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, dengan menempatkan konteks sosio kultural dan sosio politik lokal Aceh sebagai variabel kontekstual yang tidak dapat diabaikan dalam analisis, guna menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai relasi antara mandat ideologis nasional dan kekhususan identitas kedaerahan.

⁸ D. Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, "Kajian Pembinaan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Semarang Tahun 2023.," *Jurnal Riptek* 17(2), no. 137–152. (2023).

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik pembinaan ideologi pancasila & wawasan kebangsaan ?
2. Apa saja tantangan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik dalam penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan ?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa strategi yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan
2. Untuk mengidentifikasi tantangan dalam penguatan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu pemerintahan dan kebijakan publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi strategi kelembagaan dalam pembinaan ideologi negara di tingkat daerah. Kajian ini berupaya memperkaya literatur mengenai peran lembaga teknis daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai aktor strategis dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan pada masyarakat lokal. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual

terhadap pengembangan teori manajemen strategi sektor publik, terutama dalam konteks daerah dengan karakteristik social budaya dan historis tertentu, seperti Aceh yang memiliki status otonomi khusus serta dinamika ideologis pascakonflik. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi rujukan akademik bagi pengembangan model pembinaan ideologi yang kontekstual dan adaptif terhadap kondisi kedaerahan.

1.4.2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak, antara lain:

- a. Bagi Pemerintah Daerah, khususnya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan konstruktif dalam merumuskan serta mengoptimalkan strategi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, terutama dalam merancang program yang lebih efektif, terukur, dan responsif terhadap dinamika sosial politik di tingkat lokal.

- b. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan empiris dan titik tolak bagi penelitian lanjutan yang membahas isu serupa, baik dalam konteks Aceh maupun daerah lain dengan karakteristik sosial-politik yang berbeda,

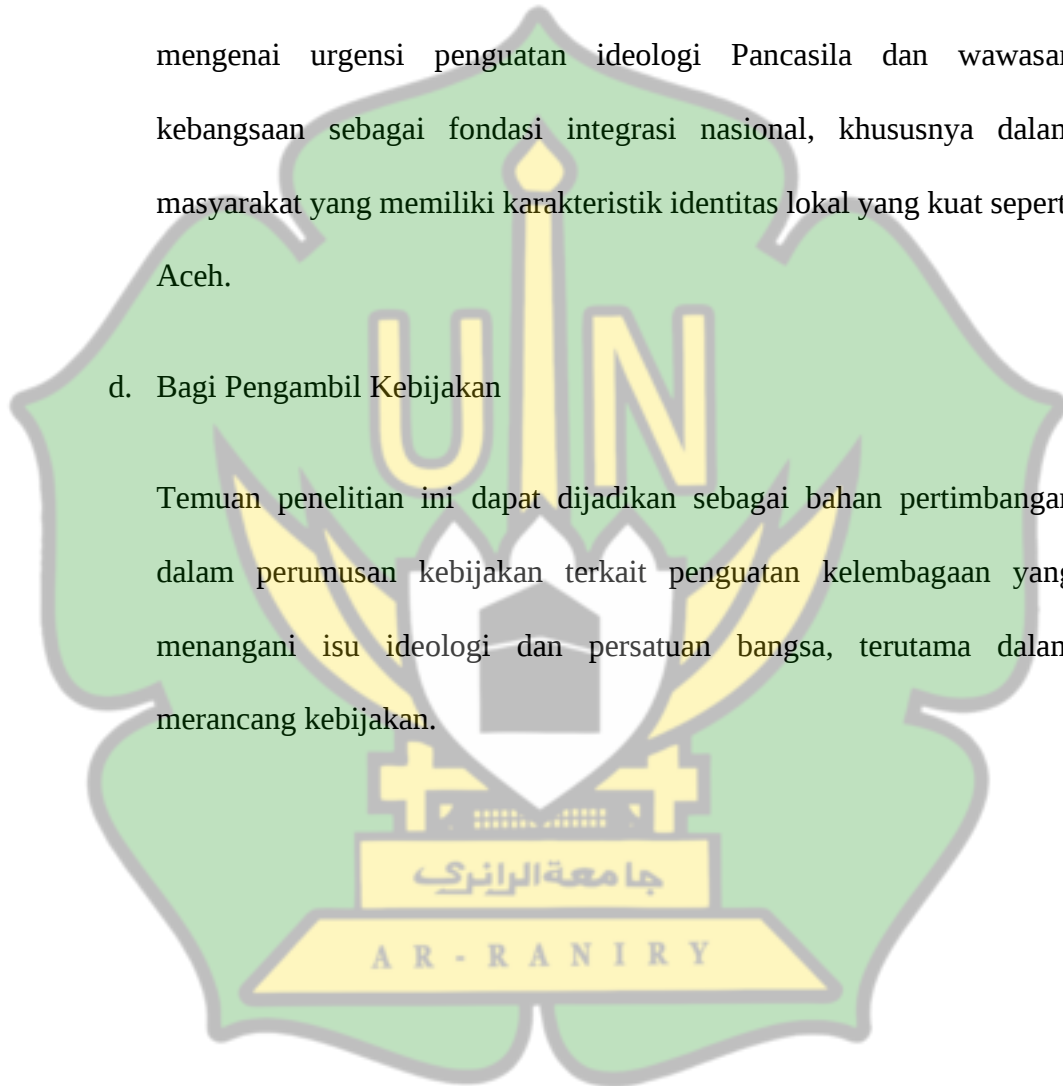
sehingga memperkaya khazanah studi komparatif mengenai pembinaan ideologi negara di tingkat subnasional.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman publik mengenai urgensi penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai fondasi integrasi nasional, khususnya dalam masyarakat yang memiliki karakteristik identitas lokal yang kuat seperti Aceh.

d. Bagi Pengambil Kebijakan

Temuan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan terkait penguatan kelembagaan yang menangani isu ideologi dan persatuan bangsa, terutama dalam merancang kebijakan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai strategi kelembagaan pemerintah daerah dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan telah menjadi perhatian sejumlah peneliti dalam lima tahun terakhir, khususnya pada konteks lembaga teknis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di berbagai daerah di Indonesia. Penelusuran terhadap penelitian terdahulu diperlukan untuk memetakan posisi penelitian ini di antara kajian kajian sejenis, sekaligus mengidentifikasi kesenjangan akademik (*research gap*) yang belum terjawab oleh penelitian sebelumnya.

Hartanti dan Sunarso yang mengkaji strategi pembinaan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta.⁹ Hasil penelitian tersebut mengungkap bahwa strategi yang diterapkan mencakup sosialisasi, seminar, dan kegiatan komunitas, serta pemanfaatan media sosial sebagai sarana penguatan nasionalisme generasi muda melalui konten kreatif. Penelitian ini juga mengidentifikasi kendala berupa rendahnya partisipasi generasi muda dalam kegiatan tatap muka.¹⁰ Relevansinya terhadap kajian ini terletak pada

⁹ Erni Hartanti dan Sunarso, "Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di Kota Yogyakarta," *Politik Dan Pemerintahan* 1, no. Wawasan Bangsa (2022).

¹⁰ Ibid.,

kesamaan objek formal, yakni strategi institusional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, meskipun berbeda lokus dan karakteristik sosial-budaya daerah.

Jurnal Ahsana mengenai sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan terhadap generasi pemuda dengan studi kasus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jakarta Utara.¹¹ Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan ideologi pada lembaga yang diteliti cenderung telah menerapkan prinsip *good governance*, ditandai indikator partisipasi masyarakat, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.¹² Namun ditemukan kelemahan pada aspek transparansi, khususnya minimnya sosialisasi anggaran dan laporan pertanggungjawaban program. Temuan ini berkontribusi berupa kerangka evaluatif *good governance* yang dapat diadaptasi pada lokus penelitian berbeda.

Kurniawan, Wijayanti, dan Pramono mengkaji pembumian Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Semarang.¹³ Penelitian ini menegaskan urgensi pembahasan wawasan kebangsaan sebagai agenda berkesinambungan, sejalan dengan dinamika kehidupan berbangsa yang terus berubah. Kontribusinya adalah penegasan bahwa pembinaan ideologi bersifat prosedural, bukan program insidental.

¹¹ Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda Di Sungai Bambu: Studi Kasus Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jakarta Utara. Ahsana: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm,” n.d.

¹² Ibid.

¹³ Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D., “Kajian Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Semarang,” *Jurnal Riptek* Vol. 17, no. No. 2, (n.d.): hlm. 137–152.

Putra mengkaji secara spesifik peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam internalisasi wawasan kebangsaan¹⁴. Penelitian ini memberikan landasan konseptual mengenai posisi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai institusi bermandat formal dalam internalisasi nilai kebangsaan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam regulasi pemerintahan daerah.

Hermanto dalam Jurnal Legislasi Indonesia mengkaji urgensi penguatan pengaturan kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).¹⁵ Penelitian ini menyoroti dimensi kelembagaan dari sudut hukum tata negara, menekankan bahwa penguatan kelembagaan pembinaan ideologi memerlukan landasan hukum yang lebih kukuh agar implementasinya berjalan efektif. Penelitian ini relevan sebagai kerangka analisis kelembagaan untuk membaca persoalan kewenangan dan kapasitas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di tingkat daerah.

Wardhana, Hakiki, dan Rahman dengan judul Perkembangan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah: Studi terhadap Pelaksanaan Urusan Pembinaan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan¹⁶. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden namun didelegasikan kepada pemerintah daerah melalui gubernur dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

¹⁴ F. A. Putra, "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Internalisasi Wawasan Kebangsaan," *Dinamika Sosial* Vol. 2, no. No. 4, (2025): hlm. 3.

¹⁵ Hermanto, "Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah," *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, no. No. 2, (2025): hlm. 145.

¹⁶ Erni Hartanti dan Sunarso, "Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di Kota Yogyakarta Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.," *AGORA* 13, no. 1, no. 46–56. (2024).

Hanafi, Irwansyah, dan Aspan mengenai efektivitas kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)¹⁷ dalam memberikan rekomendasi terhadap peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas BPIP masih dipengaruhi oleh keterbatasan kewenangan kelembagaan serta koordinasi dengan instansi pemerintah lainnya. Penelitian tersebut menegaskan bahwa keberhasilan pembinaan ideologi tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga kapasitas kelembagaan dan sinergi antarlembaga. Temuan tersebut menjadi landasan konseptual yang penting dalam memahami peran Kesbangpol sebagai pelaksana pembinaan ideologi di tingkat daerah.

Wahid mengenai aktualisasi nilai-nilai Pancasila melalui pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila¹⁸. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan BPIP merupakan bentuk penguatan kelembagaan negara dalam menjaga nilai-nilai Pancasila agar tetap menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, penelitian tersebut menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan antara BPIP dengan pemerintah daerah agar implementasi pembinaan ideologi berjalan secara efektif. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan perspektif kelembagaan yang menjadi dasar analisis terhadap strategi Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang turut menjalankan fungsi pembinaan ideologi Pancasila.

¹⁷ Ahsana, “Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda (Studi Pada Badan Kesbangpol Jakarta Utara),” 2024.

¹⁸ Deny Noer Wahid, “Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila,,” *Jurnal Keindonesiaan* 1 (2023): 2–34.

Berdasarkan kajian tersebut, mayoritas penelitian sejenis berfokus pada lokus perkotaan di Jawa dengan karakteristik social politik relatif homogen, dan belum mengkaji konteks Kota Banda Aceh yang memiliki kekhususan ketatanegaraan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dinamika ideologis pascakonflik. Kekosongan inilah yang mendasari urgensi akademik penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan Pancasila dan wawasan kebangsaan di daerah masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, ketidakseragaman implementasi kebijakan, serta belum optimalnya sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa pemahaman mengenai aspek kelembagaan dan tata kelola pemerintahan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi di tingkat daerah.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Konsep Ideologi, Ideologi Pancasila, dan Wawasan Kebangsaan

Secara etimologis, istilah ideologi berasal dari gabungan kata *idea* (gagasan) dan *logos* (ilmu pengetahuan), sehingga secara harfiah dapat dimaknai sebagai sistem pemikiran yang mendasari cara pandang suatu kelompok masyarakat terhadap realitas sosial, politik, dan kenegaraan. Dalam pengertian yang lebih operasional, ideologi dipahami sebagai seperangkat nilai, keyakinan, dan norma yang tersusun secara sistematis, yang berfungsi sebagai pedoman bertindak sekaligus instrumen legitimasi bagi penyelenggaraan kekuasaan maupun tatanan sosial suatu bangsa.

Secara tipologis, ideologi lazim dibedakan menjadi ideologi tertutup dan ideologi terbuka. Ideologi tertutup cenderung bersifat totaliter dan dogmatis, menuntut kepatuhan mutlak tanpa ruang dialektika, sedangkan ideologi terbuka bercirikan fleksibilitas nilai yang memungkinkan reinterpretasi dan reaktualisasi seiring perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai dasarnya.¹⁹ Pancasila, dalam pengertian ini, dikategorikan sebagai ideologi terbuka karena nilai-nilai yang dikandungnya tidak dirumuskan secara sepihak oleh negara, melainkan digali dari akar sosio-kultural bangsa Indonesia sendiri, sehingga senantiasa relevan diaktualisasikan pada berbagai konteks kewilayahan dan lintas generasi tanpa kehilangan jati diri nilai dasarnya.

Ideologi Pancasila secara konseptual memuat tiga dimensi yang saling berkelindan, yaitu dimensi realitas yang mensyaratkan nilai-nilainya bersumber dari kondisi riil kehidupan masyarakat, dimensi idealisme yang memuat cita-cita luhur yang hendak dicapai, serta dimensi fleksibilitas yang memungkinkan pengembangan pemikiran baru tanpa mengubah nilai dasarnya.²⁰ Ketiga dimensi tersebut menjadikan Pancasila sebagai kerangka nilai yang mampu mengakomodasi kemajemukan identitas suku, agama, ras, dan golongan tanpa tereduksi menjadi ideologi yang eksklusif, sekaligus

¹⁹ A. Aco Agus, "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi," Jurnal Tomalebbi (2022), hlm. 236.

²⁰ I. G. A. M. Handayani dan I. W. Muliawan, "Pancasila Values and National Identity: A Study on Multiculturalism in Indonesia," Society and Development 2, no. 1 (2022): hlm. 61.

berfungsi sebagai *staatsfundamentalnorm* yang menopang legitimasi seluruh produk hukum dan kebijakan penyelenggaraan negara.

Konsep wawasan kebangsaan pada dasarnya merupakan turunan operasional dari internalisasi ideologi Pancasila pada level kesadaran kolektif masyarakat. Wawasan kebangsaan dimaknai sebagai cara pandang suatu bangsa mengenai diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dengan tetap menghormati kebinekaan yang melekat pada masyarakatnya. Secara operasional, wawasan kebangsaan bertumpu pada empat konsensus dasar kebangsaan, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pemersatu kemajemukan bangsa.²¹

Penguatan wawasan kebangsaan menjadi semakin krusial di tengah derasnya arus digitalisasi informasi yang berpotensi menggerus ketahanan ideologi generasi muda melalui paparan konten yang berseberangan dengan nilai-nilai kebangsaan, sehingga literasi digital dipandang sebagai salah satu prasyarat penting bagi keberlanjutan ketahanan ideologi Pancasila pada generasi muda, termasuk di wilayah Aceh.²² Pada konteks Aceh secara

²¹ R. Mubarak, dkk., “Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Penguatan Nilai-Nilai Empat Konsensus Nasional,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 31 (2024).

²² N. Fadhila dan T. Zulfan, “Literasi Digital Dan Ketahanan Ideologi Pancasila Pada Generasi Muda Di Aceh,” *Jurnal Komunikasi Dan Kajian Media* 7, no. 1 (2023): hlm. 37.

spesifik, penguatan wawasan kebangsaan turut diarahkan sebagai instrumen preventif terhadap potensi paham radikalisme dan intoleransi di kalangan pelajar, mengingat karakteristik sosio-religius daerah yang khas menuntut pendekatan pembinaan yang kontekstual, bukan sekadar replikasi program yang seragam dari pemerintah pusat.²³

Dengan demikian, ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam penelitian ini dikonseptualisasikan sebagai dua entitas yang saling menopang: ideologi Pancasila menyediakan fondasi nilai normatif, sementara wawasan kebangsaan menjadi wahana internalisasinya pada kesadaran kolektif masyarakat. Keduanya menjadi objek material yang dibina secara kelembagaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

2.2.2. Teori Nation Building

Teori *nation building* (pembangunan bangsa) digunakan dalam penelitian ini sebagai *grand theory*, yakni kerangka teoretis paling abstrak yang menaungi keseluruhan logika berpikir mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Badan Kesatuan Bangsa dan Politik) Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

²³ J. Hariadi, W. Wilsa, dan P. Nucifera, “Penguatan Wawasan Kebangsaan Untuk Mencegah Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar SMK Di Kota Langsa,” Jurnal Pengabdian Masyarakat 4, no. 6 (2023): hlm. 122.

Secara genealogis, kajian *nation building* berkembang seiring proses dekolonisasi pada pertengahan abad ke-20, ketika negara-negara baru merdeka, termasuk Indonesia, dihadapkan pada tantangan untuk menyatukan berbagai kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki ikatan politik tunggal ke dalam satu kerangka kenegaraan yang utuh. Secara konseptual, istilah *nation* (bangsa) perlu didudukkan secara analitis berbeda dari *state* (negara), meskipun kedua istilah ini sering dipertukarkan secara longgar dalam wacana sehari-hari.

Negara dipahami terutama melalui dimensi kapasitas kelembagaan, kedaulatan teritorial, dan legitimasi penggunaan kekuasaan yang sah, sementara bangsa berakar pada imajinasi kebersamaan, memori sejarah kolektif, simbol bersama, bahasa, dan nilai-nilai yang membentuk solidaritas sosial di antara anggotanya.²⁴ Pembedaan konseptual ini memiliki implikasi metodologis yang signifikan bagi penelitian ini, karena keberhasilan pembentukan negara secara struktural-administratif, termasuk pembentukan pemerintahan daerah Kota Banda Aceh, tidak secara otomatis menjamin terbentuknya kesadaran kebangsaan yang solid pada level masyarakatnya, sehingga diperlukan proses pembinaan yang bersifat berkelanjutan untuk merawat ikatan kebangsaan tersebut.

²⁴ Kajian Konseptual Tentang Negara Dan Bangsa Dalam Perspektif Ilmu Politik. Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 2026, Hlm. 2.

Salah satu kontribusi teoretis paling berpengaruh dalam kajian *nation building* dikemukakan oleh Benedict Anderson, yang mengonseptualisasikan bangsa sebagai *imagined community* atau komunitas yang dibayangkan. Dalam pandangan ini, bangsa bukanlah entitas alamiah yang terbentuk semata-mata dari kesamaan etnis, bahasa, atau wilayah geografis, melainkan konstruksi sosial yang dihasilkan melalui proses naratif, simbolik, dan diseminatif tertentu.²⁵

Anggota suatu bangsa pada umumnya tidak pernah saling mengenal secara personal satu sama lain, namun mereka tetap merasa terikat dalam satu kesatuan imajiner melalui media, pendidikan, bahasa nasional, serta symbol simbol kenegaraan yang dipertukarkan dan direproduksi secara terus menerus dalam kehidupan sosial. Implikasi teoretis dari konsep ini sangat penting bagi penelitian ini, karena jika bangsa adalah konstruksi yang "dibayangkan," maka ia bersifat rentan terhadap erosi dan fragmentasi apabila proses naratif dan simboliknya tidak dirawat secara aktif oleh negara melalui institusinya, termasuk pada level pemerintah kota.

Dengan demikian, *nation building* bukan merupakan proyek yang tuntas sekali untuk selamanya pada saat proklamasi kemerdekaan atau pembentukan konstitusi, melainkan proses dialektis yang menuntut intervensi berkelanjutan melalui berbagai instrumen kelembagaan,

²⁵ Benedict R. O. Anderson, "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso,," *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1991, hlm. 3.

termasuk pendidikan kewarganegaraan, sosialisasi ideologi negara, dan penguatan symbol simbol kebangsaan pada level lokal yang dalam konteks penelitian ini diwujudkan melalui program program pembinaan yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Kajian mengenai integrasi nasional Indonesia menegaskan bahwa proses penyatuan bangsa melibatkan penggalan dan promosi nilai-nilai bersama, simbol nasional, dan sejarah bersama sebagai fondasi identitas kolektif.²⁶ Integrasi nasional dipahami sebagai proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu identitas nasional dan kesatuan wilayah, yang dalam konteks sejarah Indonesia ditandai oleh beberapa fase model integrasi, mulai dari model integrasi era kerajaan, model integrasi kolonial, hingga model integrasi nasional pascakemerdekaan.²⁷

Tantangan utama dalam proses integrasi ini adalah potensi konflik horizontal dan vertikal, seperti konflik antarsuku, antarbudaya, dan antar latar belakang sosial, yang berpotensi mengganggu kohesi sosial dan keutuhan bangsa apabila tidak dikelola secara tepat.²⁸

Pemikiran ini sangat relevan untuk membaca konteks Indonesia sebagai negara majemuk (*plural society*), di mana heterogenitas etnis, agama, bahasa, dan kultur lokal menghadirkan tegangan struktural antara

²⁶ Ibid

²⁷ Ibid

²⁸ Sumarno, "Nasionalisme, Negara-Bangsa, Dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah?," *Jurnal Sejarah Citra Lekha* Vol. 3, No (2020): hlm. 3–4.

identitas kedaerahan (*sub-national identity*) dan identitas kebangsaan yang lebih luas (*supra-ethnic identity*). Tegangan tersebut secara empiris tampak paling kuat pada wilayah-wilayah yang memiliki sejarah gerakan separatisme, sebagaimana terjadi di Timor Timur, Papua, dan Aceh pascakejatuhan rezim Orde Baru tahun 1998, ketika krisis politik nasional turut memunculkan kembali pertanyaan mendasar mengenai keabsahan batas-batas teritorial negara-bangsa Indonesia yang merupakan warisan era kolonial.²⁹

Konteks inilah yang menjadikan Kota Banda Aceh sebagai lokus penelitian yang secara teoretis sangat distinktif dibandingkan daerah-daerah lain di Indonesia yang tidak memiliki historisitas konflik separatisme. Penting untuk dicatat bahwa proses *nation building* pada wilayah yang memiliki sejarah gerakan separatisme tidak dapat didekati dengan cara yang sama seperti pada wilayah tanpa historisitas konflik tersebut. Pemikiran mengenai komunikasi politik dalam proses integrasi bangsa menegaskan bahwa penyatuan bangsa pada wilayah bekas konflik memerlukan pendekatan yang mengakomodasi aspirasi kedaerahan secara proporsional, bukan semata-mata pendekatan represif atau asimilatif yang seragam di seluruh wilayah.³⁰

²⁹ Ibid

³⁰ Saafroedin Bahar, "Komunikasi Politik Dalam Proses Integrasi Bangsa: Sebuah Tinjauan Dari Teori Elite.," *Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada* 2 (2021): hlm. 35.

Pendekatan integrasi horizontal menempatkan persoalan antara pusat dan daerah sebagai persoalan relasi teritorial yang dapat diminimalisasi melalui kebijakan yang bersifat akomodatif, seperti pemberian otonomi khusus. Argumentasi ini secara langsung relevan bagi pemahaman terhadap konteks Aceh, yang memiliki sejarah panjang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan baru mengakhiri konflik bersenjata melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) Helsinki pada 15 Agustus 2005, yang kemudian melahirkan status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Dengan demikian, agenda *nation building* pada konteks Aceh, dan secara spesifik Kota Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan provinsi, memiliki kekhususan tersendiri, yakni harus dijalankan secara simultan dengan agenda reintegrasi social politik pascakonflik, sehingga pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tidak dapat dilepaskan dari sensitivitas historis dan social budaya masyarakat setempat, termasuk corak keberagaman yang kuat melalui penerapan syariat Islam dalam sistem pemerintahan lokal.

Kajian mengenai pembangunan politik turut menjelaskan bahwa proses pembangunan bangsa pada dimensi teleologis diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan sistem politik tertentu, seperti stabilitas politik, integrasi politik, partisipasi, dan mobilisasi, sebagai bagian dari

keseluruhan tujuan pembangunan bangsa yang juga mencakup pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan otonomi nasional.

Dimensi ini menunjukkan bahwa *nation building* bukan semata mata persoalan ideologis-simbolik, tetapi juga melibatkan dimensi kelembagaan-fungsional yang dijalankan melalui berbagai instrumen kebijakan negara, termasuk lembaga teknis daerah yang memiliki mandat pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Berdasarkan kerangka teoretis *nation building* yang telah diuraikan, penelitian ini menetapkan tiga pisau analisis utama untuk membaca dan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Ketiga pisau analisis tersebut disusun sebagai berikut :

1. Dimensi Naratif Simbolik

Pisau analisis ini digunakan untuk membaca sejauh mana program pembinaan yang dijalankan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh berfungsi merawat imajinasi kebersamaan kebangsaan masyarakat melalui simbol, narasi sejarah, dan nilai-nilai Pancasila yang dikomunikasikan secara berkelanjutan. Mengacu pada konsep Anderson bahwa bangsa merupakan komunitas yang dibayangkan dan harus terus

menerus dirawat melalui proses naratif dan simbolik,³¹ analisis pada dimensi ini akan menelaah apakah kegiatan sosialisasi, penyuluhan, atau peringatan hari besar kebangsaan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersifat substantif dalam menanamkan kesadaran kolektif kebangsaan, ataukah sekadar bersifat seremonial administratif yang minim daya internalisasi pada masyarakat sasaran.

2. Dimensi Akomodatif Kontekstual

Pisau analisis ini digunakan untuk membaca sejauh mana strategi pembinaan ideologi tersebut mengakomodasi kekhususan identitas lokal masyarakat Aceh, termasuk dimensi keagamaan dan adat istiadat, tanpa menimbulkan kesan keseragaman program yang dipaksakan dari pusat. Mengacu pada logika integrasi horizontal yang menekankan keseimbangan hubungan antara pusat dan daerah sebagai persoalan relasi teritorial yang harus dikelola secara akomodatif,² analisis pada dimensi ini akan menelaah apakah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merancang program yang sensitif terhadap konteks otonomi khusus Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, atau justru menerapkan pendekatan yang seragam (*one-size-fits-all*) sebagaimana lazim diterapkan di daerah lain tanpa kekhususan serupa.

³¹ Benedict R. O. Anderson, "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso."

3. Dimensi Reintegrasi Pascakonflik

Pisau analisis ini digunakan untuk membaca sejauh mana program pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dipahami dan dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai kelanjutan dari agenda reintegrasi social politik pascakonflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Mengacu pada pemahaman bahwa penyatuan bangsa pada wilayah bekas konflik bersifat jangka panjang dan tidak otomatis tuntas hanya dengan penandatanganan perjanjian damai, analisis pada dimensi ini akan menelaah apakah strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memperhitungkan residu psikologis dan ideologis pascakonflik dalam masyarakat Kota Banda Aceh, atau memperlakukan pembinaan ideologi sebagai program rutin tanpa mempertimbangkan konteks historis tersebut.

2.2.3. Teori Manajemen Strategi Sektor Publik

Untuk menjembatani abstraksi *grand theory nation building* dengan unit analisis empiris penelitian ini, yaitu strategi institusional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, penelitian ini menggunakan teori manajemen strategi sektor publik sebagai *middle range theory*. Teori ini dipilih karena memiliki tingkat abstraksi yang lebih operasional dibandingkan *grand theory*, sehingga dapat diturunkan langsung menjadi indikator-indikator yang dapat diamati pada praktik kelembagaan pemerintah daerah. John M. Bryson mendefinisikan perencanaan strategis sebagai upaya yang didisiplinkan untuk membuat

keputusan dan tindakan penting yang membentuk serta mengarahkan bagaimana suatu organisasi bekerja dan mengapa organisasi tersebut bekerja seperti itu.³²

Perencanaan strategis pada mulanya diterapkan untuk kepentingan militer dan praktik penyelenggaraan negara dalam skala besar, sebelum kemudian diadaptasi secara luas ke dalam manajemen organisasi sektor publik dan nonprofit, termasuk lembaga pemerintah daerah seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.

Bryson merumuskan delapan hingga sepuluh tahapan proses manajemen strategis sektor publik, yang meliputi memprakarsai dan menyepakati proses perencanaan strategis bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal memperjelas mandat formal dan informal organisasi; merumuskan visi dan misi organisasi melakukan penilaian terhadap lingkungan internal dan eksternal melalui analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.

Mengidentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi organisasi mengembangkan strategi untuk mengelola isu-isu tersebut; meninjau dan mengadopsi rencana serta strategi yang telah dirumuskan membangun visi organisasi yang efektif di masa depan mengimplementasikan strategi yang telah disusun serta melakukan evaluasi terhadap strategi dan proses

³² John M. Bryson, "Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Fourth Edition, Jossey-Bass," 2021.

perencanaan yang telah dijalankan.³³ Tahapan evaluasi dalam kerangka ini berupa pengukuran kinerja yang dapat mengindikasikan apakah suatu strategi berhasil atau tidak diterapkan guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.³⁴

Kerangka tahapan tersebut sangat relevan untuk membaca bagaimana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan secara terencana, bukan sekadar kegiatan administratif yang bersifat rutin dan insidental. Keterlibatan seluruh lapisan organisasi serta pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan implementasi strategi dipandang sebagai kunci untuk mengurangi resistensi terhadap perubahan dan memastikan keberlanjutan program, sementara manajemen strategi yang baik juga berkontribusi terhadap efisiensi operasional, di mana organisasi publik dapat mengalokasikan sumber daya secara lebih efektif serta meningkatkan koordinasi antarbidang kerja dalam menghadapi keterbatasan anggaran yang lazim dijumpai pada instansi pemerintah daerah.

Adapun pisau analisis dari teori ini sebagai berikut :

1. Perumusan Mandat, Visi, dan Misi

³³ Ibid

³⁴ Devi Yulianti, "Manajemen Strategi Sektor Publik.," *Repository LPPM Universitas Lampung*. 2, no. 20 (2021): 2.

Pisau analisis ini digunakan untuk menelaah sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh memiliki kejelasan mandat formal dan informal dalam menjalankan tugas pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta sejauh mana visi dan misi organisasi tersebut secara koheren diturunkan menjadi program kerja yang terarah, bukan sekadar mengikuti kebijakan nasional secara seragam tanpa adaptasi terhadap konteks lokal Kota Banda Aceh.

2. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Pisau analisis ini digunakan untuk menelaah sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pemetaan terhadap kekuatan dan kelemahan internal organisasi (seperti sumber daya manusia, anggaran, dan sarana), serta peluang dan ancaman eksternal (seperti dinamika sosial-politik masyarakat Aceh, residu konflik, dan tantangan globalisasi informasi) sebelum merumuskan strategi pembinaan ideologi.

3. Identifikasi Isu Strategis dan Pengembangan Strategi

Pisau analisis ini digunakan untuk menelaah sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mampu mengidentifikasi isu-isu strategis yang spesifik pada konteks Kota Banda Aceh misalnya rendahnya partisipasi generasi muda, residu ideologis pascakonflik,

atau tantangan radikalisme dan kemudian mengembangkan strategi yang relevan untuk merespons isu-isu tersebut secara tepat sasaran.

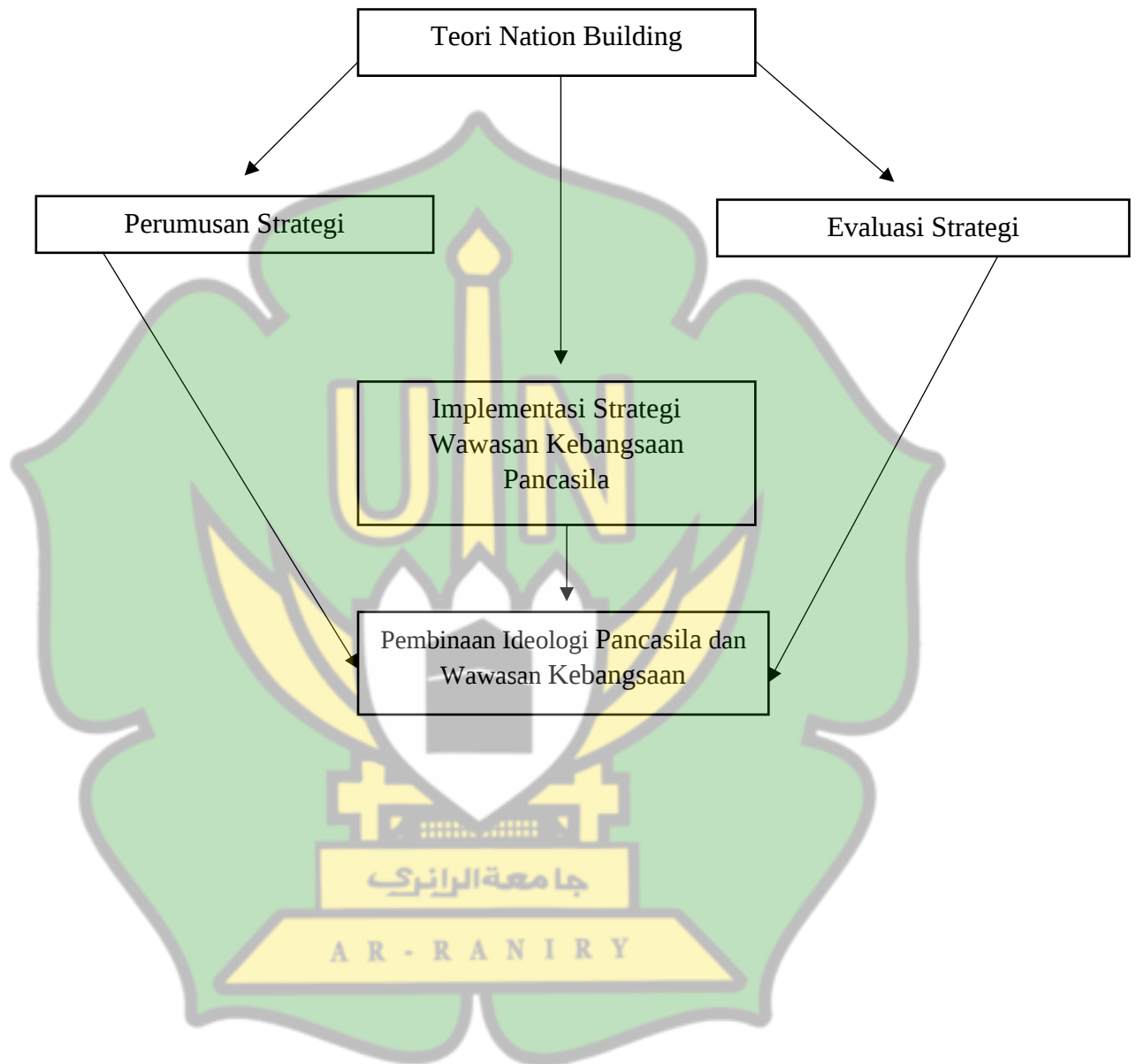
4. Implementasi Strategi

Pisau analisis ini digunakan untuk menelaah bagaimana strategi yang telah dirumuskan diwujudkan dalam bentuk program kerja konkret, termasuk metode penyampaian, sasaran kelompok masyarakat, frekuensi kegiatan, serta keterlibatan pemangku kepentingan lain seperti tokoh adat, tokoh agama, dan institusi pendidikan dalam pelaksanaan program.

5. Evaluasi dan Pengukuran Kinerja

Pisau analisis ini digunakan untuk menelaah sejauh mana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan evaluasi terhadap efektivitas program yang telah dijalankan, termasuk indikator keberhasilan yang digunakan, kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan, serta langkah perbaikan yang diambil berdasarkan hasil evaluasi tersebut untuk keberlanjutan program di masa mendatang.

2.3. Kerangka Berfikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, yang merupakan lembaga teknis daerah dengan mandat pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan kewaspadaan nasional di wilayah Kota Banda Aceh. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Kota Banda Aceh merupakan ibu kota Provinsi Aceh yang memiliki karakteristik social politik dan historis yang khas, yakni status otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh³⁵, serta dinamika ideologis pascakonflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menjadikannya lokus penelitian yang relevan untuk mengkaji strategi pembinaan ideologi secara kontekstual.

3.2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu untuk memahami secara mendalam strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagai suatu fenomena yang

³⁵ Undang-undang (UU) No. 11, “Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2006,” Pub. L. No. 11, 21 (2006).

berlangsung dalam konteks sosial, kelembagaan, dan kebijakan publik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap makna, proses, serta dinamika pelaksanaan strategi melalui interaksi langsung dengan informan dan analisis terhadap berbagai dokumen yang relevan. Menurut Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena yang dialami subjek penelitian secara holistik dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan serta perilaku yang dapat diamati³⁶.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antarfenomena yang diteliti tanpa melakukan pengujian hipotesis. Melalui penelitian ini, peneliti mendeskripsikan proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan berdasarkan kondisi empiris di lapangan, kemudian menganalisisnya menggunakan perspektif teori *nation building* dan teori manajemen strategi sektor publik. Sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, penelitian deskriptif dalam pendekatan kualitatif berfokus pada pengungkapan makna, proses, dan realitas sosial secara

³⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2022.

mendalam sehingga mampu memberikan gambaran yang utuh mengenai objek yang diteliti³⁷.

3.3. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi yang akurat, terpercaya dan menyeluruh, penelitian ini menerapkan sejumlah metode pengumpulan data, termasuk wawancara mendalam, observasi dan analisis dokumen. Gabungan dari tiga metode ini digunakan untuk melakukan triangulasi data.

- a. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi secara mendalam dari informan mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur agar proses pengumpulan data tetap berpedoman pada fokus penelitian, namun memberikan keleluasaan kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, pandangan, serta informasi yang berkaitan dengan perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi strategi yang dijalankan. Teknik ini dipilih karena mampu menghasilkan data yang lebih komprehensif mengenai fenomena yang diteliti.
- b. Dokumentasi digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari berbagai dokumen yang berkaitan dengan fokus penelitian. Dokumen yang digunakan meliputi

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2023.

peraturan perundang-undangan, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan kegiatan, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan. Melalui teknik dokumentasi, peneliti memperoleh data yang dapat melengkapi, memperkuat, dan memverifikasi informasi yang diperoleh melalui wawancara dan observasi sehingga menghasilkan data penelitian yang lebih komprehensif dan kredibel.

3.4 Teknik Pemilihan Informan

3.4.1. Purposive Sampling

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik penentuan informan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian³⁸. Teknik ini dipilih karena penelitian kualitatif tidak mengutamakan jumlah informan, melainkan kedalaman informasi yang dapat diberikan oleh informan mengenai fenomena yang diteliti. Informan yang dipilih merupakan pihak-pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kewenangan, serta keterlibatan langsung dalam pelaksanaan strategi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang

³⁸ Ibid

komprehensif mengenai proses perumusan, implementasi, dan evaluasi strategi yang dilaksanakan.

3.4.2. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Klasifikasi
1.	Dr. Alwi, S.Sos. M.Si	Kepala Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa	Pelaksana Kegiatan
2.	Nurainun S.T	Staff Pelaksana	Pelaksana Kegiatan
3.	Hammah. S.Sos.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Pelaksana Kegiatan
4.	Mohd. Saadi Nurdin	Pengadminstrasian Perkantoran	Pelaksana Kegiatan
5.	Nuria Diana	Pengadminstrasian Perkantoran	Pelaksana Kegiatan
6.	Iqbal Rokan, S.STP	Pengelola data dan Informasi	Pelaksana Kegiatan
7.	Misran Asri	Wartawan dan Editor Serambi Indonesia	Pemerhati Kegiatan
8.	Drs. H. Idrus Hayat, M.Si.	Ketua PWRI Aceh	Pemerhati Kegiatan

3.5. Sumber Data

3.5.1. Data Primer

Data primer merupakan data utama dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber pertama di lapangan. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui proses wawancara mendalam dengan informan yang dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan fokus penelitian, yaitu pejabat dan pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh yang memiliki pengetahuan serta keterlibatan dalam pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila dan

wawasan kebangsaan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi terhadap berbagai aktivitas dan program pembinaan yang diselenggarakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh. Keberadaan data primer menjadi sumber informasi utama dalam memahami secara komprehensif strategi yang diterapkan oleh instansi tersebut dalam melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

3.5.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang memiliki relevansi dengan fokus penelitian. Data ini digunakan untuk melengkapi, memperkuat, serta memverifikasi data primer sehingga diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap objek penelitian. Adapun data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari dokumen resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, seperti Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), laporan pelaksanaan program, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan literatur lain yang relevan sebagai landasan teoritis dan pendukung dalam proses analisis penelitian.

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono, yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*)³⁹. Ketiga tahapan tersebut merupakan suatu proses yang saling berkaitan dan berlangsung secara terus menerus sejak pengumpulan data hingga penelitian selesai. Melalui model analisis ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dapat diolah secara sistematis sehingga menghasilkan temuan penelitian yang sesuai dengan fokus penelitian.

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengelompokkan, serta mengorganisasikan data yang diperoleh dari lapangan agar lebih terarah sesuai dengan fokus penelitian. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian mengelompokkannya berdasarkan tema tema yang berkaitan dengan strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Proses reduksi data bertujuan untuk memudahkan peneliti

³⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*.

dalam mengidentifikasi informasi yang relevan sehingga data yang dianalisis benar-benar sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami keseluruhan informasi yang diperoleh. Dalam penelitian ini, penyajian data dilakukan secara deskriptif dalam bentuk uraian naratif yang disusun berdasarkan tema-tema penelitian serta didukung oleh kutipan hasil wawancara, hasil observasi, dan dokumen yang relevan. Penyajian data tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan sehingga memudahkan proses interpretasi data.

c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Tahap terakhir dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan disusun berdasarkan pola, hubungan, dan makna yang ditemukan dari data yang telah disajikan, kemudian diverifikasi secara berkelanjutan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh memiliki tingkat konsistensi dan didukung oleh data yang valid, sehingga mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

3.7 Teknik Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan dan kredibilitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada, sehingga data yang diperoleh dapat diuji silang dan memperkuat keabsahannya. Penelitian ini menggunakan dua jenis triangulasi, yaitu:

- a. Triangulasi Sumber, yaitu membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari informan yang berbeda, misalnya membandingkan informasi yang diperoleh dari Kepala Badan dengan informasi dari pegawai pelaksana program.
- b. Triangulasi Teknik, yaitu membandingkan dan mengecek kembali data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan dokumentasi, untuk memastikan konsistensi temuan penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Profil Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh secara normatif berkedudukan sebagai unsur penunjang urusan pemerintahan daerah yang menyelenggarakan fungsi kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik⁴⁰. Secara fungsional, kelembagaan ini menjalankan empat ranah substantif yang saling berkaitan, yaitu pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan social ekonomi budaya, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Keempat ranah tersebut mencakup pembinaan kerukunan antar suku, intra suku, umat beragama, ras, dan golongan, serta pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di tingkat daerah.

Karakteristik kelembagaan demikian menempatkan Kesbangpol bukan sekadar sebagai unit administratif teknis, melainkan sebagai instrumen kebijakan yang berfungsi menjaga ekuilibrium social politik

⁴⁰ Peraturan Mendagri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2019,” 2018, 162.

pada tingkat lokal, suatu posisi yang dalam kajian kelembagaan pemerintahan dapat dikonseptualisasikan sebagai *agent of political stability* di tingkat sub nasional.



Figure 1 Instansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Banda Aceh

Relevansi kedudukan tersebut menjadi semakin signifikan apabila dianalisis dalam konteks spesifik Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan status keistimewaan dan kekhususan, yang ditandai oleh penerapan syariat Islam secara kaffah serta warisan historis dinamika konflik vertikal yang berkepanjangan. Kondisi struktural ini menuntut adanya reorientasi paradigmatik dalam pelaksanaan fungsi pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, dari pendekatan yang bersifat normative prosedural semata menuju pendekatan kontekstual yang mengakomodasi nilai-nilai keislaman

dan adat lokal sebagai elemen konstitutif identitas kolektif masyarakat Aceh⁴¹.

Dalam perspektif teori kelembagaan baru (*new institutionalism*), fenomena ini mengindikasikan adanya tegangan antara *institutional isomorphism* yakni tekanan keseragaman struktur organisasi Kesbangpol secara nasional dengan *local embeddedness*, yakni keniscayaan adaptasi kelembagaan terhadap konfigurasi sosio kultural setempat⁴². Fenomena pembinaan kebangsaan yang mengalami penyesuaian kontekstual semacam ini juga teridentifikasi pada daerah lain di Indonesia, di mana penguatan wawasan kebangsaan diorientasikan pada pencegahan paham radikalisme dan intoleransi melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan kelompok sasaran lokal secara langsung.

Penguatan wawasan kebangsaan diarahkan untuk mencegah paham radikalisme dan intoleransi di kalangan kelompok sasaran tertentu melalui kegiatan yang bersifat partisipatif dan berbasis komunitas, sebagaimana terlihat dalam praktik pembinaan kebangsaan di wilayah lain yang juga berhadapan dengan tantangan kerawanan ideologis serupa⁴³.

⁴¹ Husni Ahmad Sirojudin, dkk., *Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori, Formulasi, Dan Implementasi Di Era*, "Governance 2 (2025).

⁴² S. Hermiken, *Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan*, *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 4(2) (2022): 1–10.

⁴³ Dkk. Sirojudin, H. A., "Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori, Formulasi, Dan Implementasi Di Era," *Governance. Bandung: Sada Kurnia Pustaka*. 2 (2023): 21.

Dengan demikian, eksistensi Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak dapat dipahami semata sebagai replikasi struktur birokrasi nasional di tingkat lokal, melainkan sebagai entitas kelembagaan yang beroperasi dalam ruang negosiasi antara imperatif integrasi nasional dan partikularitas lokal. Implikasinya, efektivitas kelembagaan ini perlu dianalisis tidak hanya dari aspek kepatuhan struktural terhadap regulasi pusat, tetapi juga dari kapasitas adaptif dalam mengelola kompleksitas identitas keislaman, adat, dan kebangsaan secara simultan suatu dimensi yang akan dielaborasi lebih lanjut pada sub bagian berikutnya.

4.2. Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan merupakan salah satu fungsi inti yang diamanatkan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di seluruh tingkatan pemerintahan daerah, termasuk Kota Banda Aceh, sebagai instrumen preventif dalam menjaga kohesi sosial dan loyalitas kebangsaan masyarakat di tengah dinamika ideologis kontemporer⁴⁴. Fungsi ini tidak dapat dipahami secara parsial sebagai kegiatan seremonial-administratif belaka, melainkan harus dimaknai sebagai upaya sistematis negara dalam menanamkan kembali (reinternalisasi) nilai-nilai dasar kebangsaan kepada warga negara, mengingat terdapat indikasi pelemahan penghayatan nilai-nilai Pancasila

⁴⁴ Peraturan Mendagri, “Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2019.”

akibat akselerasi disrupsi digital dan derasnya arus informasi yang tidak terverifikasi.

Kecenderungan pelemahan nilai-nilai kebangsaan tersebut turut menjadi perhatian pada level kebijakan nasional, di mana terdapat pengakuan bahwa nilai-nilai Pancasila semakin tergerus akibat pesatnya perkembangan era digital, yang berdampak pada perubahan pola pikir dan budaya masyarakat, termasuk meluasnya penyebaran disinformasi yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa. Kondisi ini menempatkan urgensi pembinaan ideologi Pancasila bukan sebagai kebijakan yang bersifat statis, melainkan sebagai respons adaptif terhadap kerawanan ideologis yang terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman.

Secara konseptual, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan dapat dianalisis melalui kerangka teori sosialisasi politik (*political socialization*), yang memandang proses internalisasi nilai kebangsaan sebagai mekanisme transmisi norma dan orientasi politik dari institusi negara kepada warga negara, baik melalui jalur formal maupun nonformal. Dalam praktiknya, pendekatan ini diimplementasikan melalui strategi yang berakar pada gerakan Revolusi Mental, yang dimulai dari jajaran aparatur pemerintah daerah agar dapat menjadi teladan dan ditularkan kepada masyarakat luas, khususnya menjelang momentum elektoral yang rawan polarisasi. Strategi *top-down exemplary modeling* semacam ini mengasumsikan bahwa efektivitas sosialisasi nilai kebangsaan sangat

bergantung pada kredibilitas dan konsistensi perilaku aparaturnya sebagai agen diseminasi norma.

Pada tingkatan operasional, pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan diwujudkan melalui kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencegahan paham radikalisme dan intoleransi, khususnya yang menyangkut kelompok rentan seperti pelajar dan generasi muda, melalui forum penyuluhan dan dialog partisipatif yang melibatkan kelompok sasaran secara langsung.⁴⁵ Pendekatan partisipatif ini secara teoretis lebih relevan dibandingkan model penyuluhan satu arah, karena memungkinkan terjadinya negosiasi makna dan internalisasi nilai yang lebih mendalam, alih-alih sekadar transfer informasi normatif yang berisiko tidak terinternalisasi secara substantif.

Diferensiasi konteks Kota Banda Aceh sebagai daerah dengan kekhususan penerapan syariat Islam menuntut adanya artikulasi ulang terhadap narasi kebangsaan, agar tidak dipersepsikan kontradiktif dengan identitas keislaman lokal. Dalam hal ini, pembinaan ideologi Pancasila perlu diposisikan secara komplementer, bukan substitutif, terhadap nilai-nilai keislaman yang telah menjadi fondasi kultural masyarakat Aceh, sehingga narasi kebangsaan dapat diterima sebagai bagian integral dari identitas keacehan, bukan sebagai imposisi ideologis dari pusat.

⁴⁵ P. Hariadi, J., Wilsa, W., & Nucifera, "Penguatan Wawasan Kebangsaan Untuk Mencegah Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar SMK Di Kota Langsa.," *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(6) (2023): 120 – 125.

Pendekatan demikian sejalan dengan kerangka moderasi beragama yang menekankan harmonisasi antara komitmen keagamaan substantif dan loyalitas kebangsaan sebagai dua dimensi identitas yang dapat berjalan secara koeksistensial, tanpa relasi yang bersifat dikotomis⁴⁶.

Lebih lanjut, efektivitas pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh juga perlu dianalisis dari aspek pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan, mengingat organisasi semacam ini berpotensi menjadi kanal penyebaran paham yang berseberangan dengan ideologi negara apabila tidak dilakukan pembinaan yang memadai. Fungsi pengawasan ini idealnya dilaksanakan secara preventif melalui verifikasi administratif dan dialog interaktif berkelanjutan, bukan semata bersifat responsif-represif setelah munculnya indikasi penyimpangan ideologis, sehingga pembinaan kebangsaan dapat berfungsi sebagai mekanisme deteksi dini (*early warning system*) terhadap potensi disintegrasi sosial di tingkat lokal.

4.3. Kondisi Pemahaman Kebangsaan Masyarakat

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap nilai-nilai Pancasila dinilai oleh pihak Kesbangpol berada pada kategori cukup baik secara umum, namun terdapat

⁴⁶ Sirojudin, H. A., "Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori, Formulasi, Dan Implementasi Di Era."

disparitas pemahaman antar kelompok usia. Kepala Dinas Kesbangpol mengemukakan:

“Kalau kita lihat secara umum, pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap nilai-nilai Pancasila masih cukup baik. Apalagi masyarakat Aceh memang terkenal religius dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Namun, kami melihat masih ada perbedaan tingkat pemahaman antar kelompok masyarakat generasi muda lebih banyak mendapatkan informasi dari media social informasi yang mereka terima belum tentu semuanya benar.”⁴⁷

Pernyataan tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan generasional (*generational gap*) dalam pemaknaan nilai-nilai kebangsaan, di mana generasi yang lebih tua memperoleh internalisasi nilai melalui pengalaman historis langsung, sementara generasi muda lebih banyak dimediasi oleh arus informasi digital yang tidak terverifikasi. Fenomena ini sejalan dengan kecenderungan umum yang ditemukan dalam kajian-kajian kebangsaan kontemporer, yang menyoroti disrupsi informasi di ranah digital sebagai determinan baru dalam pembentukan persepsi kebangsaan generasi muda.⁴⁸

Dari sisi rasionalisasi program, narasi yang dikemukakan oleh informan menunjukkan tiga argumen utama yang melatarbelakangi keberlanjutan program pembinaan ideologi Pancasila: pertama, dasar legal-

⁴⁷ “Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2026

⁴⁸ “Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rencana Strategis BPIP Tahun 2020–2024 (Jakarta: BPIP, 2020), Hlm. 12.,” n.d.

formal berupa tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kelembagaan; kedua, tantangan zaman berupa keterbukaan informasi yang berpotensi membawa paham-paham yang berlawanan dengan ideologi negara; dan ketiga, faktor historis kontekstual berupa pengalaman konflik di Aceh yang menjadikan penguatan semangat persatuan sebagai kebutuhan mendesak. Sebagaimana disampaikan:

“Banda Aceh juga memiliki sejarah konflik yang panjang sehingga kami ingin memastikan masyarakat tetap memiliki semangat persatuan dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah bangsa.”⁴⁹

Argumentasi tersebut memperlihatkan bahwa formulasi program pembinaan ideologi di Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan path dependency historis, yakni pengaruh pengalaman traumatik masa konflik terhadap orientasi kebijakan kekinian. Hal ini relevan dengan perspektif yang menempatkan resolusi konflik pascakonflik (*post-conflict... peacebuilding*) sebagai kerangka yang membentuk preferensi kebijakan daerah pascakonflik dalam isu-isu kebangsaan dan integrasi sosial.⁵⁰

Tujuan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan yang dirumuskan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh tidak hanya berorientasi pada penguatan kognisi politik masyarakat, melainkan

⁴⁹ “Hasil wawancara dengan Staff Pelaksana Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

⁵⁰ “Idham, Dkk., ‘Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda Di Kabupaten Wonogiri,’ *Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 4 (2025): 116–138.,” n.d.

juga pada pembentukan sikap (afektif) dan perilaku (konatif) yang resisten terhadap paham radikalisme dan disinformasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Dinas:

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai nilai Pancasila, memperkuat rasa cinta tanah air, serta menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa kami ingin masyarakat memiliki sikap toleransi, mampu menghargai perbedaan, dan tidak mudah terpengaruh oleh paham radikalisme, intoleransi maupun berita bohong.”⁵¹

Dalam aspek formulasi, proses penyusunan program dilakukan melalui mekanisme perencanaan tahunan yang bersifat partisipatif dan berbasis evaluasi. Kepala Bidang Ideologi menjelaskan:

*“Perencanaannya dimulai dari penyusunan rencana kerja tahunan. Sebelum menentukan kegiatan, kami mengevaluasi dulu program tahun sebelumnya, melihat kebutuhan masyarakat, dan menyesuaikan dengan kebijakan dari pemerintah pusat maupun Pemerintah Kota Banda Aceh”.*⁵²

Pola formulasi tersebut, jika ditelaah melalui kerangka manajemen strategis sektor publik, memperlihatkan adanya kesesuaian dengan tahapan strategic planning yang menekankan pentingnya kesepakatan awal, evaluasi internal eksternal, dan identifikasi isu strategis sebelum penetapan arah kebijakan. Model perencanaan strategis Bryson menempatkan evaluasi

⁵¹ “Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2026

⁵² “Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2026

kinerja periode sebelumnya dan analisis kebutuhan stakeholder sebagai prasyarat bagi penyusunan agenda strategis berikutnya, sebuah pola yang tergambar secara implisit dalam praktik perencanaan tahunan Kesbangpol Kota Banda Aceh.⁵³

Pertimbangan yang digunakan dalam menentukan program tidak semata bersifat teknokratis, tetapi turut memperhitungkan dimensi sosio-religius lokal. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan:

“Di Aceh kami juga mempertimbangkan nilai-nilai adat, syariat Islam, serta masukan dari tokoh agama dan tokoh masyarakat agar materi pembinaan dapat diterima dengan baik.”⁵⁴

Pernyataan tersebut menggambarkan praktik kontekstualisasi kebijakan (*policy contextualization*), yakni adaptasi substansi kebijakan nasional ke dalam kerangka nilai lokal agar memperoleh legitimasi sosial yang lebih kuat. Pendekatan demikian relevan dengan argumen bahwa internalisasi nilai-nilai Pancasila di wilayah dengan kekhasan syariat tidak perlu dipertentangkan, melainkan diposisikan sebagai dua sistem nilai yang saling melengkapi dalam bingkai NKRI.⁵⁵

⁵³ Sirojudin, H. A., “Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori, Formulasi, Dan Implementasi Di Era.”

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Staff Pelaksana Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

⁵⁵ “Idham, Dkk., ‘Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda Di Kabupaten Wonogiri,’ *Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 4 (2025): 116–138.”

4.3.1. Strategi ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Implementasi strategi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kesbangpol Kota Banda Aceh diwujudkan melalui beragam bentuk kegiatan, antara lain sosialisasi, seminar kebangsaan, dialog interaktif, pendidikan politik, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan. Kepala Bidang Ideologi memaparkan:

“Ada sosialisasi ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, seminar kebangsaan, dialog interaktif, pendidikan politik bagi masyarakat, pembinaan organisasi kemasyarakatan dan organisasi kepemudaan, serta kegiatan yang melibatkan pelajar dan mahasiswa.”⁵⁶

Dari aspek metode penyampaian, ditemukan adanya pergeseran dari pendekatan komunikasi satu arah ke arah pendekatan komunikasi partisipatif yang melibatkan diskusi, simulasi, studi kasus, dan pemutaran media audiovisual. Hal tersebut diungkapkan sebagai berikut:

“Kami menggunakan metode yang sifatnya lebih komunikatif. Tidak hanya ceramah, tetapi juga diskusi, tanya jawab, studi kasus, simulasi, dan pemutaran video. Kami ingin peserta ikut aktif berdiskusi.”⁵⁷

⁵⁶ “Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa,” n.d.

⁵⁷ Ibid.

Pergeseran metodologis tersebut mengindikasikan adanya adaptasi strategi komunikasi pembinaan ideologi terhadap preferensi belajar generasi muda kontemporer, yang lebih responsif terhadap pendekatan partisipatif dan berbasis pengalaman (*experiential learning*) dibandingkan pendekatan instruksional searah. Pemanfaatan media digital turut menjadi instrumen tambahan dalam strategi diseminasi nilai, sebagaimana ditegaskan oleh Kepala Dinas:

“Sekarang kami juga mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana penyebaran informasi karena masyarakat, khususnya anak muda, lebih aktif menggunakan media sosial.”

Temuan tersebut sejalan dengan kajian kontemporer mengenai pembinaan wawasan kebangsaan bagi generasi muda yang menekankan urgensi pemanfaatan media digital sebagai instrumen katalisator dalam memantapkan wawasan dan semangat kebangsaan, mengingat pola konsumsi informasi generasi muda yang semakin terkonsentrasi pada platform digital.⁵⁸ Lebih jauh, inovasi metodologis turut tercermin pada penggunaan kuis interaktif dan diskusi kelompok kecil sebagai variasi metode penyampaian, sebagaimana dikemukakan:

“Sekarang peserta, khususnya anak muda, lebih tertarik dengan penyampaian yang interaktif. Karena itu kami menggunakan

⁵⁸Idham, dkk., op. cit., hlm. 120.

media presentasi yang menarik, video pendek, kuis, dan diskusi kelompok.”⁵⁹

4.3.2 Sasaran dan Segmentasi Kelompok Binaan

Strategi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Banda Aceh menerapkan pendekatan segmentasi sasaran yang difokuskan pada kelompok-kelompok strategis dengan daya pengaruh sosial yang relatif tinggi. Sebagaimana dikemukakan:

*“Sasarannya cukup luas. Namun kami memberikan perhatian lebih kepada pelajar, mahasiswa, organisasi kepemudaan, aparat gampong, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, perempuan, serta masyarakat umum.”*⁶⁰

Penentuan kelompok sasaran tersebut tidak bersifat statis, melainkan disesuaikan dengan tema dan konteks kegiatan, sebagaimana dijelaskan:

*“Penentuannya juga disesuaikan dengan tema kegiatan. Misalnya kalau materinya tentang wawasan kebangsaan di lingkungan pendidikan, maka pesertanya lebih banyak dari sekolah atau perguruan tinggi. Kalau berkaitan dengan pembinaan masyarakat, kami bekerja sama dengan kecamatan dan gampong.”*⁶¹

Pola segmentasi tersebut mencerminkan penerapan logika diseminasi nilai melalui agen perubahan (*agents of change*) pada level

⁵⁹Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

⁶⁰Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2025.

⁶¹Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

komunitas, di mana kelompok-kelompok strategis seperti tokoh agama, aparaturnya gampong, dan organisasi kepemudaan diposisikan sebagai simpul jejaring (*network nodes*) yang diharapkan mampu mereplikasi nilai-nilai kebangsaan ke lingkup yang lebih luas. Pendekatan demikian merupakan strategi yang lazim digunakan dalam program pembinaan ideologi berbasis komunitas, sebagaimana ditemukan pada studi pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh Kesbangpol di berbagai daerah yang menempatkan tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan diseminasi nilai kebangsaan.

Generasi muda secara konsisten ditempatkan sebagai sasaran prioritas, tidak hanya sebagai objek pembinaan tetapi juga sebagai subjek aktif dalam penyebaran nilai. Hal ini tergambar dalam pernyataan:

*“Generasi muda menjadi salah satu sasaran utama kami... Selain menjadi peserta, mereka juga sering dilibatkan dalam diskusi, penyampaian pendapat, bahkan membantu menyebarluaskan informasi melalui media sosial.”*⁶²

Penempatan generasi muda sebagai subjek aktif tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari model pembinaan *top-down* menuju model partisipatif yang mengakui agensi (*agency*) generasi muda

⁶²Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

dalam proses transmisi nilai kebangsaan, sejalan dengan temuan riset yang menekankan keterlibatan aktif kalangan muda sebagai prasyarat efektivitas pembinaan ideologi Pancasila di era kontemporer.⁶³

4.3.3. Pola Koordinasi dan Kolaborasi Lintas Sektor

Efektivitas strategi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan turut ditentukan oleh kapasitas Kesbangpol dalam membangun koordinasi lintas sektor. Data wawancara menunjukkan bahwa koordinasi dilakukan secara rutin dengan berbagai pemangku kepentingan, sebagaimana dijelaskan:

“Koordinasi dilakukan secara rutin melalui rapat, forum koordinasi, maupun pelaksanaan kegiatan bersama. Kami bekerja sama dengan TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah gampong, Dinas Pendidikan, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi kepemudaan, serta lembaga keagamaan.”⁶⁴

Keterlibatan aktor-aktor lintas sektor tersebut, termasuk unsur keamanan (TNI-Polri), pendidikan, dan keagamaan, menunjukkan penerapan model kolaborasi multipihak (*multi-stakeholder collaboration*) dalam tata kelola pembinaan ideologi di tingkat lokal. Pelibatan narasumber dari kalangan akademisi dan tokoh agama turut memperkuat kredibilitas substansi yang disampaikan, sebagaimana ditegaskan:

⁶³Idham, dkk., op. cit., hlm. 130–132.

⁶⁴Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2025.

“Dalam beberapa kegiatan kami juga melibatkan narasumber dari akademisi dan tokoh agama agar materi yang disampaikan lebih komprehensif.”⁶⁵

Pada level pelaksanaan teknis, koordinasi internal antara staf pelaksana dan pimpinan bidang berlangsung melalui mekanisme rapat pembagian tugas serta pelaporan berjenjang. Staf Pelaksana mengemukakan:

“Sebelum kegiatan dilaksanakan biasanya kami mengikuti rapat bersama Kepala Bidang untuk membahas pembagian tugas dan persiapan kegiatan. Selama pelaksanaan kegiatan kami juga terus melaporkan perkembangan kepada pimpinan apabila ada kendala di lapangan.”⁶⁶

Pola koordinasi vertical horizontal tersebut mencerminkan struktur birokrasi yang relatif adaptif, di mana arus informasi tidak semata mengalir secara hierarkis tetapi juga melibatkan pelaporan situasional yang memungkinkan respons cepat terhadap kendala teknis di lapangan. Struktur demikian sejalan dengan prinsip koordinasi pemerintahan kolaboratif (*collaborative governance*) yang menekankan pentingnya integrasi peran antar level birokrasi maupun antar lembaga dalam pencapaian tujuan kebijakan publik.⁶⁷

⁶⁵Ibid.

⁶⁶Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

⁶⁷Sirojudin, dkk., op. cit., bab 2 dan bab 9.

4.3.4 Upaya Mitigasi, dan Evaluasi Program

Pelaksanaan strategi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Banda Aceh tidak terlepas dari berbagai kendala struktural maupun teknis. Tantangan paling dominan yang teridentifikasi adalah derasnya arus informasi digital yang tidak terverifikasi serta keterbatasan anggaran. Kepala Dinas Kesbangpol menyatakan:

“Tantangan terbesar sekarang adalah perkembangan teknologi informasi. Masyarakat, terutama anak muda, sangat mudah menerima berbagai informasi dari media sosial yang belum tentu benar keterbatasan anggaran juga menjadi tantangan karena belum semua kelompok masyarakat dapat dijangkau dalam satu tahun anggaran.”⁶⁸

Selain hambatan struktural berupa keterbatasan anggaran, ditemukan pula persoalan pada level persepsi masyarakat yang memandang kegiatan pembinaan sebagai aktivitas seremonial semata, sebagaimana dikuatkan oleh Kepala Bidang Ideologi:

“Masih ada sebagian masyarakat yang menganggap materi kebangsaan hanya sekadar teori, sehingga kami terus berupaya

⁶⁸Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2025.

membuat penyampiannya lebih menarik dan dekat dengan kehidupan sehari-hari.”⁶⁹

Pada level teknis operasional, kendala yang dihadapi staf pelaksana lebih bersifat logistik, mencakup penyesuaian jadwal narasumber dan peserta, keterbatasan fasilitas penunjang pada kegiatan luar ruangan, serta faktor cuaca. Staf Pelaksana menjelaskan:

*“Kendala yang paling sering kami alami biasanya masalah jadwal karena harus menyesuaikan waktu narasumber dan peserta. Di lapangan juga pernah terkendala oleh cuaca ketika kegiatan dilaksanakan di luar ruangan.”*⁷⁰

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, Kesbangpol Kota Banda Aceh menempuh sejumlah langkah mitigasi, antara lain inovasi metode penyampaian, penguatan kerja sama lintas instansi, serta optimalisasi anggaran melalui penentuan prioritas sasaran. Hal ini ditegaskan:

“Kami terus melakukan inovasi dalam metode penyampaian materi supaya lebih menarik. Kami juga memperkuat koordinasi dengan berbagai instansi agar pelaksanaan kegiatan bisa lebih efektif. Selain itu kami berusaha memanfaatkan anggaran yang

⁶⁹Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

⁷⁰Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

ada secara maksimal dengan menentukan prioritas sasaran pembinaan.”⁷¹

Pada dimensi evaluasi, mekanisme yang diterapkan bersifat formatif dan berkelanjutan, dilakukan setiap selesai kegiatan melalui kompilasi laporan pelaksanaan, dokumentasi, daftar hadir, serta masukan peserta dan narasumber. Sebagaimana dijelaskan oleh Staf Pelaksana:

“Setiap selesai kegiatan kami langsung melakukan evaluasi. Kami mengumpulkan daftar hadir, dokumentasi, laporan pelaksanaan, dan masukan dari peserta maupun narasumber. Semua hasil itu kemudian disampaikan kepada Kepala Bidang untuk dibahas dalam rapat evaluasi.”⁷²

Indikator keberhasilan program yang digunakan tidak semata berbasis pada ukuran kuantitatif (jumlah kegiatan dan peserta), tetapi juga mempertimbangkan ukuran kualitatif berupa tingkat partisipasi dan pemahaman substantif peserta. Kepala Bidang Ideologi menegaskan:

“Indikator keberhasilannya tidak hanya dilihat dari jumlah kegiatan atau jumlah peserta yang hadir, tetapi juga dari tingkat partisipasi peserta selama kegiatan, pemahaman

⁷¹Hasil wawancara dengan Kepala Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 2025.

⁷²Hasil wawancara dengan Staf Pelaksana Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

*mereka terhadap materi yang disampaikan, serta hasil evaluasi yang diberikan setelah kegiatan selesai.”*⁷³

Pendekatan evaluasi multidimensional tersebut sejalan dengan prinsip pengukuran kinerja organisasi sektor publik yang menekankan pentingnya indikator keberhasilan substantif (*outcome*), bukan sekadar indikator keluaran (*output*) berupa volume aktivitas, sebagai basis evaluasi efektivitas program.⁷⁴

4.4. Tantangan Implementasi Strategi Pembinaan Kebangsaan

Keberadaan Kesbangpol memiliki urgensi tinggi di Kota Banda Aceh, terutama sebagai penghubung antara negara dan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital. Kesbangpol dipandang bukan sekadar penyelenggara kegiatan seremonial, melainkan instansi yang bertanggung jawab menjaga persatuan bangsa melalui pembinaan ideologi Pancasila, sekaligus berfungsi sebagai jembatan yang membangun kesadaran kebangsaan di tengah masyarakat.

Penilaian ini sejalan dengan kerangka teori *political socialization*, yang menempatkan Kesbangpol sebagai agen sosialisasi politik⁷⁵ Dengan kata lain, pemerhati memandang Kesbangpol sebagai *intermediary*

⁷³Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Banda Aceh, 2025.

⁷⁴Sirojudin, dkk., op. cit., bab 13.

⁷⁵ Anggraini, R., & Pratama, A. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penguatan wawasan kebangsaan di era digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145–160.

institution atau simpul penghubung antara negara dan masyarakat, bukan semata unit teknis pelaksana kegiatan.

Dari sisi bentuk kegiatan, pemerhati mengonfirmasi bahwa Kesbangpol cukup aktif menyelenggarakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan politik, seminar kebangsaan, dialog lintas organisasi, serta pembinaan organisasi kemasyarakatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Strategi yang digunakan dinilai cukup relevan karena disesuaikan dengan kondisi masyarakat dan melibatkan berbagai unsur.

“Berdasarkan pengamatan saya, Kesbangpol cukup aktif menyelenggarakan sosialisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan politik, seminar kebangsaan, dialog lintas organisasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Secara umum strategi yang digunakan sudah cukup relevan karena menyesuaikan kondisi masyarakat dan melibatkan berbagai unsur”⁷⁶

Konfirmasi dari pihak eksternal ini memiliki nilai metodologis penting: keragaman program yang dilaksanakan tidak hanya bersumber dari laporan internal Kesbangpol, tetapi juga terverifikasi melalui pengamatan pihak yang tidak terlibat langsung dalam pelaksanaan. Dengan demikian,

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Misran Asri Wartawan dan Editor Serambi Indonesia

tingkat keabsahan data mengenai bentuk strategi pembinaan dapat dikategorikan cukup tinggi.

“Menurut saya masih perlu dilakukan inovasi agar penyampaian materi lebih menarik, terutama bagi generasi muda yang saat ini lebih banyak memperoleh informasi melalui media digital. Pendekatan yang interaktif dan memanfaatkan media sosial akan lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi yang bersifat konvensional.”⁷⁷

Meskipun demikian, penilaian pemerhati tidak sepenuhnya afirmatif. Dua catatan kritis utama muncul pada aspek ini. Pertama, metode penyampaian materi dinilai masih perlu diinovasikan, terutama agar lebih menarik bagi generasi muda yang lebih banyak mengakses informasi melalui media digital; pendekatan interaktif dan berbasis media sosial dipandang akan jauh lebih efektif dibandingkan metode sosialisasi konvensional.

Kedua, kegiatan yang telah dilaksanakan dinilai cukup efektif meningkatkan pengetahuan peserta yang hadir, namun dampaknya belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat karena jumlah peserta yang terbatas. Pemerhati menekankan perlunya tindak lanjut berupa edukasi berkelanjutan, agar nilai-nilai yang disampaikan tidak berhenti hanya pada saat kegiatan berlangsung.

⁷⁷ Hasil Wawancara Drs. H. Idrus Hayat, M.Si. Ketua PWRI Aceh.

“Kegiatan tersebut cukup efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta yang hadir. Akan tetapi, dampaknya belum sepenuhnya menjangkau seluruh masyarakat karena jumlah peserta masih terbatas. Oleh sebab itu, perlu adanya tindak lanjut berupa edukasi yang berkelanjutan sehingga nilai-nilai yang disampaikan tidak berhenti hanya pada saat kegiatan berlangsung.”⁷⁸

Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan jangkauan program bukan semata soal cakupan kuantitatif peserta, melainkan juga ketiadaan mekanisme tindak lanjut pascakegiatan *follow-up mechanism* yang mampu menjaga keberlanjutan internalisasi nilai. Dalam kerangka teori implementasi kebijakan, temuan ini menegaskan bahwa efektivitas program tidak cukup diukur dari terselenggaranya kegiatan itu sendiri *output*, tetapi perlu dilengkapi indikator keberlanjutan dampak atau *outcome sustainability*⁷⁹

Terkait pelibatan generasi muda, pemerhati menilai Kesbangpol telah menunjukkan komitmen melalui kerja sama dengan sekolah, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, dan komunitas. Namun, keterlibatan tersebut dinilai masih berada pada level partisipasi pasif dan perlu diperluas, agar lebih banyak anak muda terlibat sebagai pelaksana maupun penggerak kegiatan, bukan sekadar sebagai peserta.

⁷⁸ Hasil Wawancara Drs. H. Idrus Hayat, M.Si. Ketua PWRI Aceh.

⁷⁹ Nasution, H. (2024). Implementasi kebijakan dan keberlanjutan dampak program pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–70.

Catatan ini menegaskan bahwa pergeseran generasi muda dari objek menuju subjek pembinaan masih bersifat parsial. Untuk mencapai pergeseran tersebut secara utuh, generasi muda perlu didorong menjadi penggerak (driver) kegiatan, bukan hanya penerima informasi.

“Kerja sama dilakukan melalui koordinasi dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, serta media massa. Media memiliki peran yang sangat besar dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan pembinaan kebangsaan kepada masyarakat. Selain sebagai penyampai informasi, media juga berfungsi memberikan edukasi, membangun opini publik yang positif, serta menangkal penyebaran informasi yang dapat memecah persatuan bangsa.”⁸⁰

Dari aspek kolaborasi lintas sektor, pemerhati mengonfirmasi bahwa kerja sama telah dilakukan dengan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh masyarakat, TNI, Polri, serta media massa. Media dinilai memiliki peran besar dalam menyebarkan informasi mengenai kegiatan pembinaan kebangsaan, sekaligus berfungsi memberikan edukasi, membangun opini publik yang positif, dan menangkal informasi yang berpotensi memecah persatuan bangsa.

⁸⁰ Hasil Wawancara Drs. H. Idrus Hayat, M.Si. Ketua PWRI Aceh.

Penekanan pada peran media ini memperlihatkan dimensi kolaborasi yang belum sepenuhnya dioptimalkan Kesbangpol, yakni memposisikan media massa bukan sekadar kanal publikasi kegiatan, melainkan mitra strategis dalam pembentukan opini publik *agenda setting* sekaligus kontranarasi terhadap disinformasi. Hal ini relevan dikaitkan dengan gagasan kolaborasi multipihak *multi stakeholder collaboration*, dengan media sebagai simpul jejaring yang berperan ganda: penyampai informasi sekaligus penjaga ekosistem informasi publik.

“Menurut saya sudah cukup baik, tetapi masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui program-program tersebut. Oleh karena itu, pemanfaatan media digital, media sosial, serta kerja sama dengan berbagai media lokal perlu lebih ditingkatkan agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.”⁸¹

Sejalan dengan hal tersebut, diseminasi informasi mengenai program Kesbangpol kepada masyarakat luas dinilai sudah cukup baik, namun masih terdapat sebagian masyarakat yang belum mengetahui program program tersebut. Pemanfaatan media digital, media sosial, dan kerja sama dengan media lokal dipandang perlu terus ditingkatkan agar jangkauan informasi lebih luas.

⁸¹ Hasil wawancara dengan Misran Asri Wartawan dan Editor Serambi Indonesia

Respons masyarakat terhadap kegiatan Kesbangpol secara umum dinilai positif, karena kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan dan nasionalisme. Meski demikian, tingkat partisipasi masyarakat tidak merata dan berbeda beda tergantung usia, latar belakang pendidikan, serta tingkat kepedulian terhadap isu kebangsaan. Temuan ini mengonfirmasi adanya kesenjangan generasional *generational gap* dalam partisipasi, sekaligus menegaskan latar belakang pendidikan sebagai salah satu faktor diferensiasi partisipasi masyarakat.

“Respons masyarakat pada umumnya positif karena kegiatan tersebut memberikan pemahaman mengenai pentingnya menjaga persatuan dan nasionalisme. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih berbeda-beda tergantung usia, latar belakang pendidikan, serta tingkat kepedulian terhadap isu kebangsaan.”⁸²

Secara keseluruhan, penilaian pemerhati terhadap strategi pembinaan Kesbangpol Kota Banda Aceh dapat disimpulkan bersifat afirmatif dengan catatan kritis *qualified endorsement*. Pemerhati mengakui relevansi dan keberagaman bentuk strategi yang dijalankan, namun secara konsisten menyoroti tiga titik lemah, yaitu: (1) keterbatasan jangkauan program dan minimnya mekanisme tindak lanjut pascakegiatan; (2) belum optimalnya pelibatan generasi muda sebagai penggerak aktif, bukan

⁸² Hasil Wawancara Drs. H. Idrus Hayat, M.Si. Ketua PWRI Aceh.

sekadar peserta; dan (3) belum optimalnya kolaborasi strategis dengan media massa sebagai mitra kontra-narasi terhadap disinformasi.

“Tantangan terbesar adalah perubahan pola pikir masyarakat akibat derasnya arus informasi dari media digital. Banyak informasi yang belum tentu benar sehingga dapat memengaruhi pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Selain itu, rendahnya minat sebagian generasi muda terhadap isu kebangsaan juga menjadi tantangan tersendiri.”⁸³

Beralih pada tantangan penguatan ideologi Pancasila, pemerhati mengidentifikasi tantangan utama berupa derasnya arus informasi digital yang tidak terverifikasi, yang berpotensi mengubah pola pikir masyarakat dan memengaruhi pemahaman terhadap nilai-nilai kebangsaan. Rendahnya minat sebagian generasi muda terhadap isu kebangsaan turut menjadi tantangan tersendiri.

Pemerhati menegaskan bahwa media sosial memiliki relasi ambivalen atau bersifat pedang bermata dua *double-edged sword* di satu sisi dapat menjadi sarana edukasi yang efektif, tetapi di sisi lain juga berpotensi menjadi media penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, serta paham-paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Karena itu, penguatan literasi digital dipandang penting agar masyarakat mampu memilah informasi yang diterima.

⁸³ Hasil Wawancara Drs. H. Idrus Hayat, M.Si. Ketua PWRI Aceh.

Konsep relasi ambivalen ini menegaskan bahwa media digital tidak dapat dipandang semata sebagai instrumen strategi, melainkan juga mengandung risiko yang melekat pada instrumen yang sama. Implikasinya, pemanfaatan media digital dalam strategi pembinaan perlu disertai penguatan literasi digital sebagai kompetensi tambahan bagi kelompok sasaran, bukan sekadar pemanfaatan platform sebagai kanal penyampaian pesan⁸⁴

Secara lebih spesifik, hoaks dipandang sebagai hambatan nyata bukan sekadar risiko potensial karena dapat menimbulkan kesalahpahaman, memicu konflik sosial, bahkan mengikis rasa saling percaya di tengah masyarakat. Oleh karena itu, edukasi mengenai literasi informasi dinilai perlu terus ditingkatkan.

*“Media sosial memiliki dua sisi. Di satu sisi dapat menjadi sarana edukasi yang sangat efektif, tetapi di sisi lain juga menjadi media penyebaran hoaks, ujaran kebencian, intoleransi, serta paham paham yang bertentangan dengan nilai Pancasila. Karena itu, diperlukan literasi digital yang baik agar masyarakat mampu memilah informasi yang diterima.”*⁸⁵

⁸⁴ Fadhila, N., & Zulfan, T. (2023). Literasi digital dan ketahanan ideologi Pancasila pada generasi muda di Aceh. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 7(1), 33–49.

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Misran Asri Wartawan dan Editor Serambi Indonesia

Pada aspek kepedulian generasi muda, penilaian pemerhati cenderung berimbang, tidak sepenuhnya pesimistis maupun optimistis. Masih banyak generasi muda yang memiliki semangat nasionalisme, namun ada pula sebagian yang mulai kurang memahami makna Pancasila secara mendalam. Penilaian berimbang ini penting untuk menghindari generalisasi berlebihan terhadap generasi muda sebagai kelompok yang seragam, dan justru menegaskan perlunya pendekatan pembinaan yang lebih tersegmentasi berdasarkan tingkat pemahaman awal kelompok sasaran.

Pemerhati merumuskan sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas pembinaan ideologi Pancasila, meliputi perkembangan teknologi informasi, kondisi sosial masyarakat, pengaruh budaya luar, keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan pembinaan.

Faktor faktor tersebut dapat dipetakan ke dalam dua kategori berdasarkan kerangka teori implementasi kebijakan, yaitu faktor structural kelembagaan keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia dan faktor sosial kultural kondisi sosial masyarakat, pengaruh budaya luar, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Sintesis kedua kategori ini memperlihatkan bahwa tantangan penguatan ideologi Pancasila di Kota Banda Aceh bersifat multidimensional, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya melalui intervensi teknokratis semata.

“Ya, hoaks merupakan salah satu hambatan yang cukup besar karena dapat menimbulkan kesalahpahaman, memicu konflik sosial, bahkan mengurangi rasa saling percaya di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, edukasi mengenai literasi informasi harus terus ditingkatkan.”⁸⁶

Sebagai bagian dari solusi, pemerhati kembali menekankan posisi strategis media sebagai mitra pemerintah dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, melalui pemberitaan yang berimbang, penyebaran informasi yang akurat, serta kampanye mengenai pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan semangat kebangsaan. Pandangan ini menegaskan bahwa kemitraan Kesbangpol dengan media massa perlu ditingkatkan, dari sekadar hubungan publikasi kegiatan menjadi kemitraan substantif dalam produksi narasi tandingan *counter narrative* terhadap disinformasi dan intoleransi.

Langkah strategis yang direkomendasikan bagi Kesbangpol ke depan, yaitu memperluas kolaborasi dengan lembaga pendidikan, organisasi kepemudaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, serta komunitas digital; mengoptimalkan penggunaan media sosial secara aktif; menyusun program yang lebih inovatif; dan melakukan evaluasi kegiatan secara berkala agar pembinaan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

⁸⁶ Hasil wawancara dengan Misran Asri Wartawan dan Editor Serambi Indonesia

Selain data yang diperoleh melalui wawancara mendalam sebagaimana telah dielaborasi pada sub bab sebelumnya, penelitian ini turut menelaah dokumen pendukung berupa laporan kegiatan, daftar hadir, dan dokumentasi visual pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, serta pemberitaan media cetak lokal mengenai kegiatan dimaksud. Penggunaan sumber dokumenter tersebut dimaksudkan sebagai instrumen triangulasi data, yaitu prosedur pengecekan keabsahan temuan penelitian melalui perbandingan data yang bersumber dari teknik pengumpulan data yang berbeda. Dalam kerangka metodologi penelitian kualitatif, studi dokumentasi berfungsi melengkapi data hasil wawancara dengan bukti tertulis yang bersifat lebih permanen dan dapat diverifikasi ulang, sehingga kredibilitas temuan penelitian tidak semata bertumpu pada narasi lisan informan.⁸⁷

Dokumen laporan kegiatan yang dihimpun dari Kesbangpol Kota Banda Aceh mencakup laporan pelaksanaan sosialisasi ideologi Pancasila, laporan seminar kebangsaan, daftar hadir peserta, serta dokumentasi fotografis pelaksanaan kegiatan sepanjang periode penelitian. Dokumen-dokumen tersebut secara substantif mengonfirmasi keterangan informan mengenai bentuk, frekuensi, dan sasaran kegiatan pembinaan sekaligus berfungsi sebagai instrumen akuntabilitas kelembagaan yang merekam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara tertib administratif. Dalam

⁸⁷ Nurfajriani, W. V., Ilhami, M. W., Mahendra, A., Afgani, M. W., & Sirodj, R. A. (2024). Triangulasi Data dalam Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(17), 826–833.

perspektif manajemen kearsipan pemerintahan, dokumen semacam ini memiliki nilai pembuktian atas pelaksanaan kewenangan administratif suatu instansi publik, sehingga keberadaannya tidak dapat direduksi sekadar sebagai arsip pelengkap, melainkan sebagai bukti otentik kinerja kelembagaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun administratif.⁸⁸ Dengan demikian, konsistensi antara narasi informan dan rekam jejak dokumenter tersebut memperkuat keabsahan data mengenai variasi bentuk kegiatan pembinaan kebangsaan yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya.

Aspek dokumentasi kedua yang dianalisis dalam penelitian ini adalah pemberitaan media cetak lokal, khususnya Harian Serambi Indonesia, terhadap pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh. Pemilihan sumber media cetak ini juga selaras dengan latar belakang salah satu informan penelitian yang berprofesi sebagai wartawan dan editor pada media tersebut, sehingga terdapat keterkaitan langsung antara perspektif informan sebagai pemerhati kebijakan sebagaimana telah dipaparkan pada dengan praktik pemberitaan institusi tempatnya bernaung. Secara teoretis, liputan media cetak atas kegiatan pembinaan kebangsaan dapat dianalisis melalui kerangka teori *agenda setting*, yang menegaskan bahwa media massa tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga turut membentuk

⁸⁸ Setiawan, L. A., Nailatussyarifah, F., Nurazkya, E. S., Al Ghifari, H. R., Claudia, I., Agusta, D., & Saverio, D. F. (2025). Peran Arsiparis dalam Menjamin Keaslian Dokumen Pejabat Publik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 4(4), 426–435.

perhatian dan persepsi publik terhadap suatu isu melalui pemilihan, penempatan, dan intensitas pemberitaan.⁸⁹ Dalam konteks ini, pemberitaan mengenai kegiatan Kesbangpol berfungsi ganda, yaitu sebagai instrumen diseminasi informasi kepada khalayak yang tidak terjangkau secara langsung oleh kegiatan tatap muka, sekaligus sebagai mekanisme legitimasi publik atas keberadaan dan kinerja program pembinaan kebangsaan di ranah lokal.

Secara metodologis, konvergensi antara data wawancara, dokumen laporan kegiatan, dan pemberitaan media cetak menghasilkan pola triangulasi sumber yang saling menguatkan (*mutually corroborating*), sehingga temuan mengenai efektivitas dan tantangan implementasi strategi pembinaan kebangsaan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara lebih komprehensif. Konvergensi tersebut turut menegaskan posisi media cetak bukan sekadar kanal publikasi pasif, melainkan mitra strategis yang berperan memperluas jangkauan diseminasi nilai kebangsaan, sekaligus menyediakan jejak dokumenter independen atas pelaksanaan program di luar rekam administratif internal kelembagaan.

⁸⁹ Trifanny, R., Aulia, A., Agustina, R. D., Salsabila, R., & Isnanda, R. M. (2024). Peran Media Sebagai Agenda Setting pada Penyebaran Peringatan Darurat. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 5(12).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banda Aceh, dapat disimpulkan bahwa peran Kesbangpol sangat penting sebagai lembaga pemerintah yang menjadi penghubung antara negara dan masyarakat dalam memperkuat kesadaran kebangsaan. Keberadaan Kesbangpol semakin relevan di tengah perkembangan teknologi informasi, derasnya arus globalisasi, serta meningkatnya penyebaran informasi digital yang tidak selalu terverifikasi.

Secara umum, strategi pembinaan yang dijalankan Kesbangpol Kota Banda Aceh telah mencakup berbagai bentuk kegiatan, seperti sosialisasi nilai-nilai Pancasila, pendidikan politik, seminar kebangsaan, dialog lintas organisasi, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta kegiatan yang melibatkan pelajar, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan organisasi kepemudaan. Ragam kegiatan tersebut menunjukkan bahwa Kesbangpol telah berupaya menjalankan fungsi sosialisasi politik dan pembinaan wawasan kebangsaan secara cukup aktif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Meskipun demikian, pelaksanaan program masih menghadapi sejumlah keterbatasan. Dari sisi jangkauan, kegiatan yang dilaksanakan belum sepenuhnya menjangkau seluruh lapisan masyarakat karena jumlah peserta masih terbatas dan belum didukung oleh mekanisme tindak lanjut yang berkelanjutan. Dari sisi pelibatan generasi muda, keterlibatan yang ada masih cenderung bersifat pasif sebagai peserta, belum sepenuhnya berkembang menjadi pelibatan aktif sebagai penggerak kegiatan. Selain itu, pemanfaatan media massa dan media digital sebagai mitra strategis dalam penyebaran informasi dan kontra-narasi terhadap hoaks masih perlu ditingkatkan.

Tantangan utama dalam penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Banda Aceh berasal dari derasnya arus informasi digital, penyebaran hoaks, ujaran kebencian, pengaruh budaya luar, rendahnya minat sebagian generasi muda terhadap isu kebangsaan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan ideologi Pancasila tidak dapat dilakukan secara seremonial semata, melainkan memerlukan pendekatan yang inovatif, partisipatif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan oleh Kesbangpol Kota Banda Aceh telah berjalan dengan cukup baik dan memiliki relevansi yang tinggi, namun masih memerlukan penguatan pada aspek inovasi metode, perluasan

jangkauan, pelibatan generasi muda, optimalisasi kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan media massa dan media digital secara lebih strategis.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Kesbangpol Kota Banda Aceh

Kesbangpol perlu terus mengembangkan metode pembinaan yang lebih kreatif, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi muda, terutama dengan memanfaatkan media sosial, platform digital, dan pendekatan komunikasi yang lebih menarik. Selain itu, perlu dibuat mekanisme tindak lanjut setelah kegiatan agar nilai-nilai yang disampaikan tidak berhenti pada saat kegiatan berlangsung.

2. Bagi Generasi Muda

Generasi muda perlu didorong untuk tidak hanya menjadi peserta dalam kegiatan pembinaan, tetapi juga dilibatkan sebagai pelaksana, penggerak, dan agen penyebar nilai-nilai kebangsaan di lingkungan masing-masing. Keterlibatan aktif generasi muda sangat penting untuk menjaga keberlanjutan internalisasi nilai Pancasila di tengah perkembangan zaman.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya disarankan untuk mengkaji pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dengan pendekatan yang lebih luas, baik dari sisi wilayah, kelompok sasaran, maupun variabel penelitian lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas program pembinaan kebangsaan di daerah.



DAFTAR PUSTAKA

- Agus., A. Aco. "Relevansi Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka Di Era Reformasi." *Jurnal Tomalebbi*, hlm. 235–2 (2022).
- Ahsana. "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda (Studi Pada Badan Kesbangpol Jakarta Utara)," 2024.
- Anggraini, R., & Pratama, A. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam penguatan wawasan kebangsaan di era digital. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Kebijakan Publik*, 9(2), 145–160.
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Rencana Strategis BPIP Tahun 2020–2024 (Jakarta: BPIP, 2020), Hlm. 12., n.d.
- Bahar, Saafoedin. "Komunikasi Politik Dalam Proses Integrasi Bangsa: Sebuah Tinjauan Dari Teori Elite." *Jurnal Ketahanan Nasional, Universitas Gadjah Mada* 2 (2021): hlm. 35.
- Benedict R. O. Anderson. "Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Verso." *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 1991, hlm. 3.
- Bryson, John M. "Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, Fourth Edition, Jossey-Bass," 2021.
- Devi Yulianti. "Manajemen Strategi Sektor Publik." *Repository LPPM Universitas Lampung*. 2, no. 20 (2021): 2.
- Erni Hartanti dan Sunarso. "Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di Kota Yogyakarta." *Politik Dan Pemerintaahan* 1, no. Wawasan Bangsa (2022).
- Fadhila, N., & Zulfan, T. (2023). Literasi digital dan ketahanan ideologi Pancasila pada generasi muda di Aceh. *Jurnal Komunikasi dan Kajian Media*, 7(1), 33–49.

- Nasution, H. (2024). Implementasi kebijakan dan keberlanjutan dampak program pemerintah daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(1), 55–70.
- Pembinaan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat Di Kota Yogyakarta Oleh Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.” *AGORA* 13, no. 1, no. 46–56. (2024).
- Handayani, I. G. A. M., & Muliawan, I. W. “Pancasila Values and National Identity: A Study on Multiculturalism in Indonesia. Society and Development,.” *Politik* 2(1), no. 59–73. (2022).
- Hariadi, J., Wilsa, W., & Nucifera, P. “Penguatan Wawasan Kebangsaan Untuk Mencegah Paham Radikalisme Dan Intoleransi Di Kalangan Pelajar SMK Di Kota Langsa.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 4(6) (2023): 120 – 125.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Dr. Alwi. S.Sos. M.Si., n.d.
- Hasil Wawancara Dengan Ibu Nurainun, n.d.
- Hasil Wawancara Dengan Kepala Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan Dan Karakter Bangsa, n.d.
- Hermanto. “Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Perlukah?” *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol. 18, no. No. 2, (2025): hlm. 145.
- Hermiken, S. “Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sungai Penuh Dalam Pembinaan Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan.” *Jurnal Administrasi Nusantara Maha* 4(2) (2022): 1–10.
- Husni Ahmad Sirojudin, dkk. “Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori, Formulasi, Dan Implementasi Di Era.” *Governance* 2 (2025).
- Idham, Dkk., ‘Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Kalangan Muda Di Kabupaten Wonogiri,’ *Dinamika Sosial*, Vol. 2, No. 4 (2025): 116–138,.” n.d.
- Idham, I., Sudewi, S., & Nadriana, L. “Penguatan Nilai-Nilai Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Bagi Masyarakat.” *Jurnal Abdi Masyarakat Saburai (JAMS)*, 3(2),

no. 96. (2022).

Idrus, I. A., & Lukito, M. D. "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda Di Sungai Bambu: Studi Kasus Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jakarta Utara. Ahsana." *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1), no. 1–7. (2024).

Kajian Konseptual Tentang Negara Dan Bangsa Dalam Perspektif Ilmu Politik," *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 2026, Hlm. 2.,” n.d.

Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D. "Kajian Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Semarang." *Jurnal Riptek* Vol. 17, no. No. 2, (n.d.): hlm. 137–152.

Kurniawan, E., Wijayanti, T., & Pramono, D. "Kajian Pembumian Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Di Kota Semarang Tahun 2023." *Jurnal Riptek* 17(2), no. 137–152. (2023).

Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi Bandung: PT Remaja Rosdakarya*, 2022.

Mubarak, R., Munfiatik, S., Widyanti, E., & Hasanah, S. N. "Sosialisasi Wawasan Kebangsaan Sebagai Upaya Penguatan Nilai-Nilai Empat Konsensus Nasional." *Jurnal Pengabdian Masyarakat*. 2, no. 31 (2024).

Peraturan Mendagri. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2019," 2018, 162.

Pradhan, R. and Kurniawan. T. "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan." *Jurnal PkM Pemberdayaan Masyarakat*, 4(1). (2023).

Putra, F. A. "Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Internalisasi Wawasan Kebangsaan." *Dinamika Sosial* Vol. 2, no. No. 4, (2025): hlm. 3.

Sirojudin, H. A., Dkk. "Manajemen Strategis Sektor Publik: Teori, Formulasi, Dan Implementasi Di Era." *Governance. Bandung: Sada Kurnia Pustaka*. 2 (2023): 21.

Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Terhadap Generasi Pemuda Di Sungai Bambu: Studi Kasus Di Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Jakarta Utara," *Ahsana: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2024, Hlm," n.d.

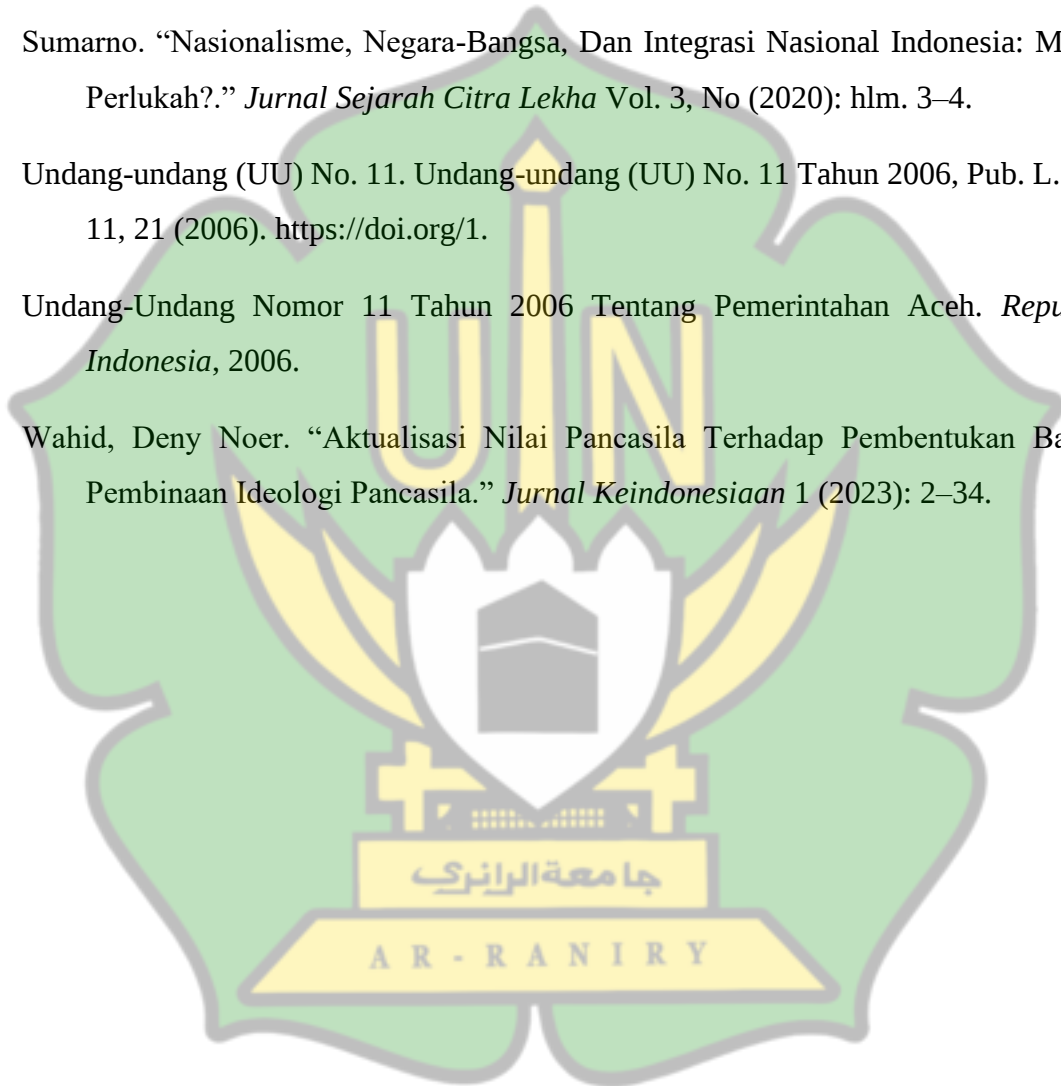
Sugiyono. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumarno. "Nasionalisme, Negara-Bangsa, Dan Integrasi Nasional Indonesia: Masih Perlukah?." *Jurnal Sejarah Citra Lekha* Vol. 3, No (2020): hlm. 3–4.

Undang-undang (UU) No. 11. Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2006, Pub. L. No. 11, 21 (2006). <https://doi.org/1.>

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. *Republik Indonesia*, 2006.

Wahid, Deny Noer. "Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila." *Jurnal Keindonesiaan* 1 (2023): 2–34.



Lampiran 1 Izin Turun Lapangan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-932/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2026

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

KESBANGPOL KOTA Banda Aceh

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 210801010

Nama : SYIFA QURATUNNADA

Program Studi/Jurusan : Ilmu Politik

Alamat : JL. CUT MUTIA LR. NANGKA 1 NO. 24 MANGGA Ujong Baroh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **STRATEGI KESBANGPOL PADA PENGUATAN TRUST PEMUDA TERHADAP POLITIK KESBANGPOL DI Kota Banda Aceh**

Banda Aceh, 19 Mei 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 30 September 2026

جامعة الرانيري
AR - RANIRY



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Twk. Hasyim Banda Muda No. 1 Telepon Banda Aceh (0651) 22888
Faxsimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolpemkoba@gmail.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR: 070/591/Ba.Kesbangpol/2026

Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian
2. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 66 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 31 Tahun 2020, tentang Standar Operasional Prosedur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Menimbang : 1. Surat Dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN AR-RANIRY Nomor B-932/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/05/2026 Tanggal 19 Mei 2026 perihal Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, memberikan Rekomendasi kepada :

Nama/NIM : SYIFA QURATUNNADA / 210801010
Pekerjaan Peneliti : Mahasiswi
Alamat Peneliti : Jl. Rukoh Utama Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
Lokasi Penelitian : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh
Lama Penelitian : 8 Juni s/d 8 Agustus 2026
Status Penelitian : **Baru / Lanjutan**
Judul Penelitian : Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh Dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Tujuan Penelitian : Untuk mengetahui strategi dan tantangan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dalam Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Peserta : -
Penanggung jawab : Eka Januar,M.Soc.Sc. (Wakil Dekan)

CATATAN :

1. Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk kepentingan penelitian yang bersangkutan.
2. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian/Survei yang tidak sesuai/tidak ada kaitannya dengan judul kegiatan Penelitian/Survei tersebut di atas.
3. Peneliti harus memberikan hasil laporan penelitiannya kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh.
4. Apabila masa berlaku surat Surat Keterangan Penelitian ini berakhir, sedangkan pelaksanaan peneliti belum selesai maka perpanjangan Surat Keterangan Penelitian harus diajukan kembali kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh dengan melampirkan laporan kegiatan penelitian
5. Surat Keterangan Penelitian ini dicabut kembali apabila pemegangnya tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.



Dikeluarkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 08 Juni 2026

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BANDA ACEH,



Rizal Abdillah, S.Sos. M.Si
Pembinu Utama Muda
NIP. 197312181993031005

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Walikota Banda Aceh (sebagai laporan)
2. Para Kepala SKPK/Camat di Wilayah Kota B.Aceh;
3. Dekan Fakultas PTN/PTS/Lembaga
4. Arsip.

Lampiran 3 Dokumentasi Informan



Wawancara dengan Ibu Nurainun Selaku
Staff Pelaksana Kegiatan



Wawancara dengan Bapak Mohd. Saadi
Nurdin selaku Pengadministrasian Kantor



Wawancara dengan Ibu Hammah Selaku
Analisis Kebijakan Ahli Muda



Wawancara dengan Bapak Dr. Alwi.
S.sos. M.Si selaku Kepala Bidang Bina
Ideologi dan Wawasan Kebangsaan
Karakter Bangsa



Wawancara dengan Nuri Diana
Selaku Pengadministrasi Perkantoran



Wawancara dengan Misran Asri Selaku
Wartawan dan Editor Serambi
Indonesia



Wawancara dengan Drs. H. Idrus
Hidayat, M.Si selaku Ketua PWRI
Aceh



Dokumen Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota
Banda Aceh



Kegiatan Pekan Pancasila dengan komponen bangsa oleh Ster Mabes TNI tahun 2023 di Kantor Wali Kota Banda Aceh.
Foto: AJNN/Imamatunnisa Farha.



Sosialisasi Pengamalan Pancasila (P4) dalam kehidupan sehari-hari dimasyarakat

21 August 2025

